

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS,
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA KALIMANTAN
TENGAH TAHUN 2015-2019**

Oleh

Cici Desnatalia Ompusunggu
BAA 116 053

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Ekonomi Pembangunan
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
TAHUN 2021**

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS,
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN BELANJA MODAL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015-2019**

Oleh

Cici Desnatalia Ompusunggu
BAA 116 053

SKRIPSI


Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Ekonomi Pembangunan
Bidang Konsentrasi Ekonomi Keuangan Daerah

Palangka Raya, Maret 2021.

PEMBIMBING I



Drs. Karmen Marpaung, MP
NIP. 19601218 198903 1 001

PEMBIMBING II


Drs. Dedi Takari, ME
NIP. 19651227 199402 1 001

Mengetahui :

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Palangka Raya
Dekan.


Prof. Dages Jaya Negara, SE., M.Si, C.EIA
NIP. 19620729 198803 1 011

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Ketua,


Drs. SABIRIN, ME
NIP. 19620609 198903 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS,
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN BELANJA MODAL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015-2019**


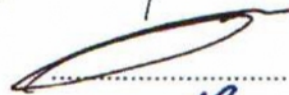
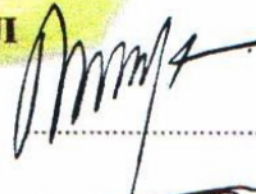
Cici Desnatalia Ompusunggu
BAA 116 053

Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya
Tanggal 15 Februari 2021

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Ekonomi Pembangunan
Bidang Konsentrasi Ekonomi Keuangan Daerah

TIM PENGUJI

1. Drs. Karmen Marpaung, MP
Ketua
2. Drs. Dedi Takari, ME
Anggota
3. Dr. Alexandra Hukom, SE, M.Si
Anggota
4. Dra. Diana Betris, M.Si
Anggota
5. Drs. Siang I. Suluh, ME
Anggota



PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Palangka Raya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Persyaratan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh serta sanksi lainnya sesuai dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Bab XX tentang sanksi karya ilmiah dan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palangka Raya, 25 Maret 2021

Yang membuat pernyataan,


Cici Desnatalla Umpusunggu

BAA 116 053

MOTTO

Hanya karna kamu bukan seseorang bukan berarti kamu gagal dalam hidup. Dalam arena kehidupan manusia, penghormatan dan penghargaan jatuh kepada orang-orang yang menunjukkan sifat-sifat baiknya dalam tindakan, jalani kehidupanmu dengan benar.

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.

(Dikutip dari ayat Alkitab Filipi 4 :13)

Persembahan...

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang yang sangat kucintai dan kusayangi sebagai tanda bakti hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga, yaitu Mamak saya Pelegia Sianturi (Oppung Herty Boru) dan Bapak saya Marlan Ompusunggu (Oppung Herty Doli) yang selalu memberikan dukungan moril maupun materi yang selalu memanjatkan doa dan cinta kasih untuk Putri mu ini yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas persembahan ini. Semoga ini menjadi langkah awal putri mu ini untuk membuat bapak dan mamak bangga dan bahagia.

Teruntuk Kakak, abang, dan adik saya Hendri Ompusunggu, Iyun Ompusunggu, Erni Ompusunggu, Modesti Ompusunggu, Morina Ompusunggu, Inra Ompusunggu, Eriska Ompusunggu yang selalu memberi semangat dan nasihat. Terimakasih atas segala dukungan yang telah diberikan, semoga kita selalu dalam penyertaan Tuhan. Amin

Teruntuk Diriku Sendiri, Cici Desnatalia Ompusunggu. Terimakasih sudah berjuang, Kamu Hebat.

ABSTRAK

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015-2019

Disusun Oleh:

Cici Desnatalia Ompusunggu

Pembimbing :

Nim : BAA 116 053

1) Drs. Karmen Marpaung,MP

2) Drs. Dedi Takari, ME

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan periode 5 tahun. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka. Dokumen yang menjadi sumber utama data dapat dilihat pada Kantor Biro Pusat Statistik masing-masing Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa DAU dan DAK berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan PAD dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

This research is entitled "The Effect of General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), Local Own Revenue (PAD), and Capital Expenditures on District / City Economic Growth in Central Kalimantan Province 2015-2019. This study aims to analyze the effect of the General Allocation Fund (DAU), the Special Allocation Fund (DAK), Regional Original Income (PAD), and Capital Expenditures on District / City Economic Growth in Central Kalimantan Province. This research uses quantitative research. The data used in this study are secondary data with a period of 5 years. The data collection method uses literature study method. Documents that are the main source of data can be seen at the Central Bureau of Statistics of each Regency / City in Central Kalimantan. The data analysis used in this research is multiple linear regression analysis. The results of this study state that the DAU and DAK have no significant effect on economic growth, while PAD and capital expenditures have a significant effect on economic growth.

Keywords: *General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Regional Original Income, Capital Expenditure, Economic Growth.*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **"Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019"**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1).

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini bukanlah hanya kerja dari penulis semata melainkan juga melibatkan berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Danes Jaya Negara, SE, M.Si, C.EIA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terima kasih atas segala layanan akademik dan administrasi yang sangat membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Sabirin, ME selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya sekaligus dosen pembimbing akademik.
3. Drs. Karmen Marpaung, MP selaku dosen Pembimbing Skripsi pertama saya dan Bapak Drs. Dedi Takari, ME selaku dosen pembimbing kedua saya. Terimakasih atas bantuan, bimbingan dan arahnya selama penyusunan Skripsi ini.

4. Ibu Dr. Alexandra Hukom, SE, M.Si, Ibu Dra. Diana Betris, M.Si, Bapak Drs. Siang I. Suluh, ME selaku dosen selama masa perkuliahan yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama masa perkuliahan dan sekaligus sebagai dosen penguji skripsi saya.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan.
6. Staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas layanan administrasi yang sangat membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua Tercinta saya Ayah Marlan Ompusunggu dan Ibu Pelegia Sianturi yang selalu memberikan dukungan moril dan material, doa, perhatian, semangat, dan motivasinya kepada penulis saat menempuh pendidikan hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Abang kandung saya Hendri Ompusunggu, Iyun Ompusunggu, Inra Ompusunggu, Kakak kandung saya Erni Ompusunggu, Modesti Ompusunggu, Morina Ompusunggu, Adik kandung saya Eriska Ompusunggu serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan, doa dan semangat serta motivasi kepada penulis.
9. Kepada teman-teman tersayang Nasib Cristian L Siallagan, SE, Idristriono Sihotang, Daniel Sihombing, Markus Laurencus Hutasoit yang selalu ada kapanpun saya butuh dan juga yang telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Dedy Pasaribu, Oven Sihombing, Della Sianipar, Winny Hutasoit, Lasmaida Simamora dan teman-teman yang lain

yang belum tertulis namanya yang selalu saling mendukung selama masa perkuliahan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat dan anugerahnya selalu kepada semua pihak yang telah membantu baik secara materil maupun spiritual kepada penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, waktu, dan tenaga yang dimiliki penulis. Akhir kata penulis mengucapkan mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Palangka Raya, Maret 2021

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Teori.....	10
2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi.....	10
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi	16
2.1.3 Teori Pengeluaran Pemerintah	20
2.1.4 Pengelolaan Keuangan Daerah.....	23
2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	24
2.1.6 Dana Alokasi Umum	26
2.1.7 Dana Alokasi Khusus	26
2.1.8 Pendapatan Asli Daerah.....	32
2.1.9 Belanja Modal	34
2.2 Penelitian Terdahulu.....	37
2.3 Kerangka Berpikir	41
2.4 Hipotesis.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	46
3.2 Daerah Penelittian.....	46
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	46
3.4 Defenisi Operasional Variabel Penelitian.....	47

3.5	Metode Analisis Data.....	49
3.5.1	Pengujian Asumsi Klasik.....	50
3.5.2	Pengujian Hipotesis.....	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	57
4.1.1	Luas Wilayah.....	57
4.1.2	Topografi.....	59
4.1.3	Keadaan Penduduk	61
4.1.4	Keadaan Perekonomian	63
4.1.5	Pertumbuhan Ekonomi	64
4.1.6	Struktur Ekonomi	66
4.1.7	PDRB Perkapita	67
4.1.8	Keadaan Keuangan Daerah	68
4.1.9	Keadaan DAU Kalimantan Tengah.....	69
4.1.10	Keadaan DAK Kalimantan Tengah.....	70
4.1.11	Keadaan PAD Kalimantan Tengah.....	72
4.1.12	Keadaan Belanja Modal Kalimantan Tengah	73
4.2	Uji Asumsi Klasik.....	74
4.2.1	Uji Normalitas Data.....	74
4.2.2	Uji Heteroskedastisitas	75
4.2.3	Uji Multikolinieritas	77
4.2.4	Uji Autokorelasi	78
4.3	Pengujian Hipotesis	80
4.3.1	Uji Koefisien Determinasi	80
4.3.2	Uji Statistik F (Simultan).....	81
4.3.3	Uji t (Parsial).....	82
4.4	Hasil Model Regresi Linier Berganda	84
4.5	Pembahasan	86
4.5.1	Pengaruh DAU Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah	86
4.5.2	Pengaruh DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah	87
4.5.3	Pengaruh PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah	88
4.5.4	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Tengah.....	89
4.6	Keterbatasan Penelitian.....	90
4.7	Implikasi.....	91

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	93
5.2	Saran	94

Daftar Pustaka.....

Lampiran.....

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	44
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Data	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 PDRB ADHB dan ADHK Kota Palangka Raya.....	5
Tabel 1.2 PAD Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah	58
Tabel 4.2 Penyebaran dan Luas Masing-masing Kelas Ketinggian Wilayah Daratan Kalimantan Tengah	60
Tabel 4.3 Luas Masing-masing Kelas Kemiringan Wilayah Daratan Provinsi Kalimantan Tengah	60
Tabel 4.4 Wilayah Fisiografi di Provinsi Kalimantan Tengah	61
Tabel 4.5 Proyeksi Penduduk Menurut Kab/Kota Kalimantan Tengah dan Jenis Kelamin	62
Tabel 4.6 Distribusi Penduduk (Persen) Kab/Kota Provinsi Kalimantan Tengah	63
Tabel 4.7 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah	64
Tabel 4.8 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah	68
Tabel 4.9 Realisasi Penerimaan dan Belanja Kalimantan Tengah.....	69
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	76
Tabel 4.11 Uji Multikolinieritas metode TOL dan VIF	77
Tabel 4.12 Hasil Uji Autokorelasi	78
Tabel 4.13 Hasil Uji Run Tes	79
Tabel 4.14 Hasil Uji koefisien Determinasi	80
Tabel 4.15 Hasil Uji F (Simultan).....	81
Tabel 4.16 Hasil Uji t (Parsial)	82
Tabel 4.17 Hasil Analisis Regresi.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu perekonomian sangat dibutuhkan peran serta pemerintah untuk melakukan berbagai jenis pembelanjaan. Seperti halnya pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai, membangun, dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan serta membiayai anggota kepolisian dan TNI untuk menjaga keamanan nasional merupakan pengeluaran wajib Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah memiliki kewajiban mutlak dalam mengumpulkan sumber-sumber dana (penerimaan) untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah yaitu belanja langsung dan tidak langsung. Agar terwujudnya sasaran yang tepat dalam pengumpulan dana untuk pembiayaan negara maka pemerintah melaksanakan suatu kebijakan fiskal dengan menyusun Anggaran Penerimaan Dan Belanja Negara (APBN), sedangkan untuk tingkat daerah dinamakan Anggaran Penerimaan Dan Belanja Daerah (APBD).

Melalui Desentralisasi fiskal, pemerintah memiliki wewenang untuk menggali hasil pendapatan daerah dan melakukan alokasi mandiri untuk memprioritaskan dalam hal pembangunan, dengan harapan dapat pemeratakan pembangunan disegala wilayah dengan potensi masing-masing sesuai keinginan daerah, pemerintah pusat harus menyerahkan

pembiayaan, personalia, dan perlengkapan (3P) sebagai syarat mutlak. Desentralisasi diatur dalam UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang disempurnakan oleh UU No. 33 Tahun 2004. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan hasil penerimaan daerahnya untuk pembiayaan kegiatan pembangunan, oleh karena itu peningkatan PAD, DAU dan DAK selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, dan peningkatan PAD, DAU dan DAK tersebut harus berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi daerah, namun daerah tidak akan berhasil, bila daerah tidak mengalami Pertumbuhan Ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD, DAU dan DAK. Keberhasilan peningkatan PAD, DAU dan DAK hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya dalam Pertumbuhan Ekonomi.

Dengan dikelolanya APBD oleh pemerintah daerah masing-masing tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat dalam rangka perwujudan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal, pemerintah daerah lebih leluasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Pertumbuhan ekonomi ini dapat

diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana PDRB merupakan nilai tambahan dari barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode biasanya satu tahun.

Idealnya, untuk menjaga tingkat kepercayaan publik terhadap berjalannya sebuah pemerintahan daerah yang baik (*Good Governance*), maka sudah seharusnya pemerintah daerah mengalokasikan belanja daerah bagi kepentingan publik khususnya belanja modal bagi sektor pendidikan, kesehatan, transportasi dan atau infrastruktur yang tercermin dari realisasi anggaran belanja daerah, dimana alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik, namun yang terjadi selama ini adalah bahwa lebih banyak belanja daerah digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif, seperti misalnya adalah belanja pegawai (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Pertumbuhan ekonomi juga di pengaruhi oleh belanja negara. Berdasarkan kerangka model teori yang dibangun oleh Keynes, pengaruh kenaikan pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan bahwa pada saat pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan, maka pengeluaran yang akan direncanakan oleh daerah akan mengalami kenaikan. Kenaikan pengeluaran ini akan menaikkan permintaan agregat, yang akan mendorong naiknya produksi barang dan jasa, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Selain teori Keynes, Dritsakis dan Adamopoulus (2004) juga membuktikan

bahwa belanja negara berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 kabupaten (Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur) dan 1 kota (Kota Palangka Raya) yang juga ikut serta dalam desentralisasi fiskal yang ada di Indonesia, sehingga setiap daerahnya berhak menentukan kondisi daerah termasuk Pertumbuhan Ekonomi.

Kalimantan Tengah merupakan salah satu Provinsi yang juga ikut melaksanakan otonomi daerah, dimana hak pengelolaan potensi dan pembangunan daerah sepenuhnya diberikan kepada pemerintah daerah. Agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah dapat lebih meningkat maka pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dituntut untuk lebih meningkatkan pendapatan daerahnya dengan diberikan wewenang sepenuhnya mengelola potensi yang ada di daerah tersebut. Adapun berbagai jenis penerimaan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.

Menurut (Undang-Undang No.28 Tahun 2009) Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dilihat dari besarnya PDRB pada suatu daerah tersebut. Berikut tabel pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 1.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan
Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2019

Tahun	PDRB atas dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	PDRB atas dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)
2010	5 840 121.4	5 840 121.4
2011	6 679 663.1	6 264 961.2
2012	7 577 867.8	6 721 508.7
2013	8 637 942.4	7 227 378.7
2014	9 829 642.2	7 730 526.9
2015	11 289 343.5	8 286 033.4
2016	12 792 940.0	8 859 548.2
2017	14 532 145.7	9 479 165.6
2018	16 532 537.3	10 154 119.2
2019	18 258 642.9	10 881 804.9

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2010-2019 perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 1.2
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Triwulan II 2018, dan Triwulan I,II 2019 (Rp Miliar)

Komponen Pendapatan Daerah	Realisasi II 2018	Realisasi I 2019	Realisasi II 2019	% Perubahan I 2019	% Perubahan II 2019
Pendapatan	1976,81	1087,86	2492,69	9,78	26,10
Pendapatan Asli Daerah	716,16	352,99	862,20	42,93	20,39
Pajak	579,87	304,95	668,57	50,51	15,30
Retribusi Daerah	4,75	1,89	5,22	6,16	9,94
Hsl Pengelolaan Kekayaan yg Dipisahkan	63,81	0,00	78,76	-	23,42
Lain-lain PAD Yang Sah	67,73	46,14	109,65	8,38	61,89
Pendapatan Transfer	1250,03	731,53	1617,43	(1,32)	29,39
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	39,37	15,84	31,68	(19,55)	(19,54)
Dana Bagi Hasil SDA	126,42	75,46	167,65	19,39	32,61
Dana Alokasi Umum	668,39	534,54	935,45	1,86	39,96
Dana Alokasi Khusus	349,95	0,00	475,35	(100,00)	35,83
Dana Penyesuaian	65,90	105,69	6,82	194,05	-
Lain-Lain	-	7,31	0,49	-	-
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	10,62	3,34	13,06	25,73	22,96
Hibah	3,24	1,92	3,61	8,62	11,21
Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	7,38	1,41	59,98	59,98	28,09

Sumber : Ditjend Perbendaharaan Negara Kalteng, Diolah

Realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada triwulan II 2019 tercatat sebesar Rp2,49 triliun atau tumbuh sebesar 26,10% (yoy), meningkat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,78% (yoy) (Tabel 1.2). Meningkatnya realisasi transfer dana dari pemerintah pusat menjadi penyebab peningkatan pertumbuhan pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada triwulan II 2019.

Secara keseluruhan, pada triwulan II 2019 realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebesar 48,47% dari pagu yang dianggarkan.

Tingkat pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Namun yang terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja daerah pada wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti termotivasi untuk meneliti dengan judul **“Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah :

1. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Kalimantan Tengah ?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kab/kota di Kalimantan Tengah ?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kab/kota di Kalimantan Tengah ?
4. Apakah Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kab/kota di Kalimantan Tengah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kab/Kota Kalimantan Tengah tahun 2015-2019
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kab/kota Kalimantan Tengah tahun 2015-2019
3. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kab/kota Kalimantan Tengah tahun 2015-2019

4. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kab/kota Kalimantan Tengah tahun 2015-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah : hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Bagi peneliti selanjutnya : hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam bidang manajemen keuangan daerah dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dengan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. (Jhingan, 2014).

Pembangunan ekonomi juga bisa diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi; pertama, pembangunan sebagai suatu proses. Bahwa pembangunan merupakan suatu tahapan yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Kedua, pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Sebagai suatu

usaha tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. (Jhingan, 2014).

Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Ketiga, peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikan terus menerus. (Jhingan, 2014)

a. Teori Adam Smith

1) Hukum Alam

Meyakini berlakunya hukum alam dalam persoalan ekonomi yang menganggap bahwa setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri. Yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingannya itu demi keuntungan sendiri. Setiap orang jika dibiarkan bebas akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri, karena semua orang dibiarkan bebas akan memaksimalkan kesejahteraan mereka secara agregat. Adam Smith pada dasarnya menentang setiap campur tangan pemerintah dalam industri dan perniagaan. Kekuatan yang tidak terlihat, yaitu pasar persaingan sempurna yang merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara

otomatis, cenderung untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial.
(Jhingan, 2014)

2) Pembagian Kerja

Titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktifitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan meningkatnya keterampilan kerja, penghematan waktu dalam memproduksi barang, penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir bukan berasal dari tenaga kerja melainkan dari modal.

3) Proses Penumpukan Modal

Smith menekankan, penumpukan modal harus dilakukan terlebih dahulu dari pada pembagian kerja. Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi, dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan yang sepenuhnya di investasikan.

4) Agen Pertumbuhan,

Menurutnya para petani, produsen dan pengusaha, merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi ketiga agen tersebut saling berkaitan erat. Bagi Smith pembangunan pertanian mendorong peningkatan pekerjaan konstruksi dan

perniagaan. Pada waktu terjadi surplus pertanian sebagai akibat pembangunan ekonomi, maka permintaan akan jasa perniagaan dan barang pabrikan meningkat pula, ini semua akan membawa kemajuan perniagaan dan berdirinya industri manufaktur. Pada pihak lain, pembangunan sektor tersebut akan meningkatkan produksi pertanian apabila petani menggunakan teknologi yang canggih. Jadi pemupukan modal dan pembangunan ekonomi terjadi karena tampilnya para petani, produsen dan pengusaha.

Menurut Smith, proses pertumbuhan ini bersifat kumulatif (menggumpal). Apabila timbul kemakmuran sebagai akibat kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur, dan perniagaan, kemakmuran itu akan mengarah pada pemupukan modal, kemajuan teknik, meningkatnya produk, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan secara terus menerus. Di lain pihak naiknya produktifitas akan menyebabkan upah naik dan ada akumulasi kapital. Tetapi karena Sumber Daya Alam terbatas adanya, maka keuntungan akan menurun karena berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang. Pada tingkat inilah perkembangan mengalami kemacetan. (Jhingan, 2014)

b. Teori Thomas Robert Malthus

Malthus menilik perhatian pada “perkembangan kesejahteraan” suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan suatu negara

sebagian bergantung pada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut.

Menurut Malthus pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan ekonomi. Yang mana pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif. Rendahnya konsumsi atau kurangnya permintaan efektif yang menimbulkan persediaan melimpah. Menurut Teori Malthus merupakan sebab utama keterbelakangan. Untuk pembangunan, negara harus memaksimalkan produksi di sektor pertanian dan sektor industri. Ini memerlukan kemajuan teknologi, pendistribusian kesejahteraan dan tanah secara adil, perluasan perdagangan internal dan eksternal, peningkatan konsumsi tidak produktif, dan peningkatan kesempatan kerja melalui rencana pekerjaan umum. (Todaro, 2000)

c. Teori Schumpeter

Salah satu pendapat yang menjadi landasan teori pembangunan adalah adanya keyakinan bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun, Schumpeter meramalkan bahwa dalam jangka panjang sistem kapitalisme akan mengalami kemacetan (Stagnasi). Pendapat ini sama dengan pendapat kaum Klasik.

Menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi proses inovasi dan pelakunya adalah para inovator atau pengusaha. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para Pengusaha (*entrepreneurs*). Dan kemajuan ekonomi tersebut dapat dimaknai sebagai peningkatan output total masyarakat.

Dalam membahas perkembangan ekonomi, Schumpeter membedakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, meskipun keduanya merupakan sumber peningkatan output masyarakat. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, tanpa adanya perubahan dalam teknologi produksi itu sendiri.

Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh adanya inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha (*entrepreneurs*). Inovasi disini bukan hanya berarti perubahan yang radikal dalam hal teknologi, inovasi dapat juga direpresentasikan sebagai penemuan produk baru, pembukaan pasar baru, dan sebagainya. Inovasi tersebut menyangkut perbaikan kuantitatif dan sistem ekonomi itu sendiri yang bersumber dari kreativitas para pengusahanya. Menurut Schumpeter, pembangunan ekonomi akan berkembang pesat dalam lingkungan masyarakat yang menghargai dan merangsang setiap orang untuk menciptakan hal-hal yang baru (inovasi), dan lingkungan yang paling cocok untuk itu adalah

masyarakat yang menganut paham *laissez faire*, bukan dalam masyarakat sosial ataupun komunis yang cenderung mematikan kreativitas penduduknya. (Jhingan, 2014)

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tujuan pembangunan secara makro adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan peningkatan hasil produksi dan pendapatan.

Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Djojohadikusumo, 1994).

Menurut Sirojuzilam dan Mahalli (2010) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan

pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang-bidang ekonomi. Dalam teori ekonomi pembangunan, dikemukakan ada enam karakteristik pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- a) Terdapatnya laju kenaikan produksi perkapita yang tinggi untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang cepat
- b) Semakin meningkatnya laju produksi perkapita terutama akibat adanya perbaikan teknologi dan kualitas input yang digunakan
- c) Adanya perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa
- d) Meningkatnya jumlah penduduk yang berpindah dari pedesaan ke daerah perkotaan (urbanisasi)
- e) Pertumbuhan ekonomi terjadi akibat adanya ekspansi negara maju dan adanya kekuatan hubungan internasional
- f) Meningkatnya arus barang dan modal dalam perdagangan internasional. (Jhingan, 1995).

Data ekonomi merupakan sumber informasi sistematis untuk dapat mengukur sejauh mana perkembangan aktivitas ekonomi suatu negara. Suatu data yang akurat diharapkan dapat menggambarkan suatu kondisi statistik perekonomian. Statistik ini digunakan oleh para ahli ekonomi untuk mempelajari perekonomian dan oleh para pengambil keputusan untuk mengawasi pembangunan ekonomi dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat. Dalam konsep dasar ekonomi makro indikator yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB adalah nilai pasar semua

barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu (Mankiw, 2006).

Dalam konsep regional Produk Domestik Bruto dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator ekonomi makro suatu daerah, yang menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah. Dengan menghitung PDRB secara teliti dan akurat baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai keberhasilan pembangunan di suatu daerah, yang memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi yang mewakili peningkatan produksi di berbagai sektor lapangan usaha yang ada (Saggaf, 1999).

Berdasarkan rumusan pengertian di atas, maka dalam konsep regional, pertumbuhan ekonomi daerah adalah angka yang ditunjukkan oleh besarnya tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto suatu daerah yang diukur atas dasar harga konstan. Bagi suatu daerah provinsi, kabupaten/kota gambaran PDRB yang mencerminkan adanya laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam data sektor-sektor ekonomi yang meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa lainnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari data konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal bruto, perubahan persediaan, ekspor dan impor. Sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$PED = \frac{PDRBt - PDRBt-1}{PDRBt-1} \times 100 \%$$

Di mana:

PED = Pertumbuhan Ekonomi Daerah

PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto Periode Tertentu

PDRBt-1 = Produk Domestik Regional Bruto Periode Sebelumnya.

Menurut Todaro (2000) terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, ketiganya adalah: Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia, Pertumbuhan penduduk beberapa tahun selanjutnya yang akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital, kemajuan teknologi Model pertumbuhan Neo Klasik dipelopori oleh Robert M. Solow pada tahun 1950-an. (Jhingan, 2014)

Ada dua hal utama yang dibahas dalam model ini, yaitu peranan modal dan perubahan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi. Namun untuk sementara perubahan teknologi dianggap konstan sehingga akan diketahui bagaimana peran modal dalam proses pertumbuhan. Akumulasi modal dan kedalaman modal terjadi pada saat pertumbuhan persediaan (stock) modal lebih cepat daripada pertumbuhan tenaga kerja. Dalam kondisi tanpa perubahan teknologi, akumulasi modal akan mendorong pertumbuhan keluaran per tenaga kerja, meningkatkan marginal produk tenaga kerja serta meningkatkan upah. Namun akumulasi modal juga akan mendorong berkurangnya pengembalian modal (*return of capital*) dan menurunkan tingkat suku bunga riil.

2.1.3 Teori Pengeluaran Pemerintah

Semakin meningkatnya peranan pemerintah maka semakin besar pengeluaran pemerintah dalam persentasenya terhadap pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah, yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Tetapi perlu disadari bahwa proporsi pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Nasional Bruto (GNP) adalah suatu ukuran yang sangat kasar terhadap kegiatan/peranan pemerintah dalam suatu perekonomian. (Suparmoko, 2000)

a. Musgrave dan Rostow

Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran Pemerintah, dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, menurut mereka rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sehingga pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. (Suparmoko, 2000).

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit.

Pada tahap lanjut, Rostow berpendapat bahwa pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran untuk layanan sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya. Sementara itu, Dalam satu proses pembangunan menurut Musgrave, rasio investasi swasta terhadap GNP semakin besar. Tetapi rasio investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil.

b. Teori Adolf Wagner (Hukum Wagner)

Pengamatan empiris yang dilakukan oleh Adolf Wagner terhadap negara - negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke 19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Wagner mengukur perbandingan

pengeluaran pemerintah terhadap PDB dengan mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. (Suparmoko, 2000)

c. Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga

mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Menurut Peacock dan Wiseman pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

Jadi dalam keadaan normal, kenaikan PDB menyebabkan kenaikan penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal jadi terganggu katakanlah karena perang atau eksternalitas lain, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan tersebut. Konsekuensinya timbul tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak lebih besar. Pungutan pajak yang lebih besar menyebabkan dana swasta untuk berinvestasi dan modal kerja menjadi berkurang. Efek ini disebut efek penggantian (*displacement effect*) yaitu adanya gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. (Suparmoko, 2000)

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana

kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharawan.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005, pasal 1). Dalam pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang.

2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. Selanjutnya berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Bahwa pemerintah daerah bersama sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memuat petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.

Sedangkan berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana

pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah tentang APBD. Dijelaskan juga “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu”. Ketentuan ini berarti, bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. (Widjaja, 2007).

APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur.

2.1.6 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55 Tahun 2005). Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pusat kepada daerah. Transfer dari pusat ini cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dengan leluasa dapat menggunakannya untuk memberi pelayanan publik yang lebih baik atau untuk keperluan lain. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi, kabupaten dan kota yang besarnya ditetapkan sekurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

2.1.7 Dana Alokasi Khusus

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional yang dilaksanakan di tingkat daerah. Kegiatan khusus ini sulit untuk diperkirakan dengan rumus alokasi khusus.

DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah pusat untuk tujuan nasional. Kebutuhan khusus alokasi DAK meliputi :

- a. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.
- b. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
- c. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai.
- d. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.
- e. Pembangunan Jalan, rumah sakit, irigasi dan air bersih

DAK disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah, oleh sebab itu DAK dicantumkan dalam APBD. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas. Pembiayaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ini bisa disamakan dengan belanja pembangunan karena digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas pelayanan publik berupa pembangunan sarana dan prasana publik. (Ndadari dan Adi, 2008).

Menurut Arianto dan Adi (2007) infrastruktur dan sarana prasana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Jika sarana dan prasarana yang memadai di daerah itu maka masyarakat akan dapat melaksanakan aktifitas pekerjaan sehingga akan berdampak positif terhadap roda perekonomian sehingga akan berpengaruh pada produktifitas yang akan semakin meningkat.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah suatu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan skala prioritas nasional. Daerah tertentu dimaksud disini adalah daerah dengan pertimbangan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Tujuan diberikan DAK adalah membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, serta untuk mendorong percepatan pembangunan daerah sehingga tercapainya sasaran prioritas nasional.

Kebutuhan khusus yang di maksud adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum dan kebutuhan yang merupakan atau prioritas nasional. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus adalah kebutuhan yang bersifat khusus yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan kawasan transmigrasi dan kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan dikawasan terpencil, saluran irigrasi primer dan saluran drainase

primer. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional antara lain proyek yang dibiayai donor pembiayaan reboisasi oleh daerah dan proyek-proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jumlah DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN didasarkan masing-masing bidang pengeluaran yang disesuaikan dengan kebutuhan. (Widjaja, 2002)

DAK kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum, dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah. Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBN. Porsi dana pendamping ditetapkan sekurang-kurangnya 10%. Dikecualikan dari ketentuan dana pendamping adalah pembiayaan kegiatan reboisasi yang berasal dari dana reboisasi penghasil. Pengalokasian DAK kepada daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Teknis terkait dan instansi yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.

Untuk menyatakan komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut, maka perlu penyediaan dana dari sumber penerimaan umum APBD sebagai pendamping atas DAK dari APBN. Dengan berlakunya peraturan pemerintah, pelaksanaan alokasi DAK disesuaikan dengan proses penataan organisasi pemerintahan daerah dan proses pengalihan pegawai daerah. (Widjaja, 2007)

Secara teoritis, jika pelayanan publik dasar dan kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas utama nasional dan tidak menjadi prioritas utama daerah, maka mekanisme transfer dana alokasi khusus tanpa dana pendamping (*conditional non-matching grant*) adalah yang terbaik. Namun, umumnya dana alokasi khusus bertujuan sebagai stimulus, maka biasanya dibutuhkan dana pendamping, walaupun kecil. Dana alokasi khusus dengan dana pendamping dan jumlah yang tidak terbatas (*open-ended matching grant*) cocok untuk mengoreksi ketidakefisienan dalam pembiayaan fasilitas publik yang meningkat dari adanya eksternalitas (*spillovers*) kepada masyarakat di luar daerah pengalokasian. (Widjaja, 2002)

Berbagai jenis (*matching grant open-ended*) jumlah tidak terbatas dan (*closed-ended*) jumlah terbatas, faktanya tidak ditujukan untuk mengatasi ketidakseimbangan atau ketidakcukupan kapasitas fiskal antar daerah. *Open-ended matching grant* adalah alternatif terbaik untuk mengurangi peningkatan pengeluaran untuk penyediaan pelayanan publik, jika diasumsikan bahwa pemerintah tidak memiliki keterbatasan dana dan pemerintah daerah atau penerima transfer menentukan jumlah pembiayaan yang mencerminkan tingkat sebenarnya dari diskresi lokal terhadap aktifitas atau fasilitas publik. (Shah, 1994)

Agar lebih bisa dikontrol, Pemerintah Pusat umumnya lebih memilih dana alokasi khusus dengan jumlah yang terbatas (*closed-ended grant*), seperti misalnya DAK di Indonesia. Ketentuan

pengenaan dana pendamping (*matching grants*) tersebut dalam alokasi DAK merupakan bagian yang tidak terpisah dari karakteristik DAK yang merupakan pelengkap (stimulus) dari pemerintah pusat untuk kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena kegiatan-kegiatan tersebut juga merupakan prioritas nasional seperti dijelaskan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku saat ini.

Presentase dari *matching grants* yang ditanggung oleh pemerintah pusat menunjukkan tingkat subsidi terhadap pembangunan fasilitas atau pelayanan publik daerah. Dalam hal ini, besarnya prosentasi dari subsidi oleh pemerintah pusat, atau kecilnya dana pendamping, juga dapat merupakan indikasi dari keterlibatan yang relatif dominan dari pemerintah pusat. (Mikessel, 2003)

Adanya DAK adalah merupakan bagian dari federalisme fiskal, yang mencari satu struktur pengeluaran pemerintah yang tepat sesuai dengan tingkatan pemerintahan. Setiap tingkat pemerintah menangani barang dan pelayanan publik yang sesuai dengan dimensi spasial pelayanannya. Satu daerah dapat dianalogkan dengan negara di dunia internasional, di mana kebutuhan pembangunan domestik tidak selalu sesuai dengan kebutuhan skala global. Demikianlah bahwa tuntutan pembangunan satu daerah dapat tidak sama dengan kebutuhan nasional dilihat dari berbagai sudut pandang.

2.1.8 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut (Aries Djaaenuri, 2012:88) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut (Haw Widjaja, 2009:42) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi”.

Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah ;
 1. Hasil pajak daerah, terdiri dari: jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah propinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan

air bawah tanah dan permukaan. Sedangkan jenis pajak daerah untuk kabupaten terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C.

2. Hasil retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh penda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ada tiga jenis golongan retribusi daerah retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.
 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam jenis pendapatan ini adalah deviden yang diperoleh BUMD yang dibagikan bagi pemegang saham, dalam hal ini merupakan pendapatan bagi pemerintah daerah.
 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Termasuk pendapatan ini adalah pendapatan bunga deposito, jasa giro, hasil penjualan surat berharga investasi, pendapatan dari ganti rugi atau kerugian/kehilangan kekayaan daerah, denda, penggantian biaya dan lain-lain.
- b. Dana Perimbangan
 - c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

2.1.9 Belanja Modal

Menurut Halim (2004) tentang pengertian Belanja Modal, yaitu: “Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum”. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat (1) :

“Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan asset tetap lainnya”.

Dari kedua kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/investaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas asset.

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002, belanja modal dibagi menjadi:

- a) Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum

- b) Belanja Aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.

Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 kategori utama :

- 1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan penyelesaian untuk balik nama dan sewa, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

- 2) Belanja Modal Peralatan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi dan jaringan termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

1	Judul	Analisis Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendidikan (Studi Empiris Kota Dan Kabupaten Di Sumatera Barat
	Peneliti	Deviani (2016)
	Variabel	X1 : Belanja Daerah, X2 : Pertumbuhan Ekonomi, Y : Pendidikan
	Metode Penelitian	Statistik deskriptif
	Hasil Penelitian	Ratio belanja terhadap PDRB, dan ratio pertumbuhan belanja mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun ratio belanja modal tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
2	Judul	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/bukan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten /Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2011
	Peneliti	Wulan Fauzi (2013)
	Variabel	X1 : PAD, X2 : DAK, X3 : DBH Pajak/Bukan Pajak, Y : Pertumbuhan Ekonomi
	Metode Penelitian	Metode Data Panel
	Hasil Penelitian	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap PDRB, tetapi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak berpengaruh negatif terhadap PDRB.
3	Judul	Analisis Belanja Daerah Pada Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2014
	Peneliti	Teguh Rahayu (2016)

	Variabel	X1 : Belanja Tidak Langsung, X2 : Belanja Langsung
	Metode Penelitian	Analisis Regresi Linier Berganda
	Hasil Analisis	Pertumbuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung memiliki kecenderungan berfluktuatif. Proporsi belanja tidak langsung pada Kabupaten/Kota secara umum mengalami penurunan setiap tahunnya sedangkan proporsi belanja langsung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemudian belanja tidak langsung dan belanja langsung berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi
4	Judul	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah
	Peneliti	Rizka Novalistia (2016)
	Variabel	X1 : Pajak Daerah, X2 : Retribusi Daerah, X3: Lain-lain PAD Yang Sah, X4 : Bagi Hasil Pajak, Y : Kemandirian Keuangan Daerah
	Metode Penelitian	regresi berganda (<i>multiple regressions</i>)
	Hasil Penelitian	Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Daerah, Retribusi Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat Kemandirian Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
5	Judul	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
	Peneliti	Elsera, Gusti Della (2017)
	Variabel	X1 : Pendapatan Pajak Daerah, X2 : Pendapatan Retribusi, X3 : Hasil/Laba BUMD, X4: Lain-lai PAD yang Sah, Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

	Metode Penelitian	Regresi Berganda
	Hasil Penelitian	Pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi, hasil pengelolaan perusahaan milik daerah, dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. Secara simultan menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi, hasil pengelolaan perusahaan milik daerah, dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan
6	Judul	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur Tahun 2001-2010
	Peneliti	Arif Barak (2014)
	Variabel	X1 : Belanja Langsung, X2 : Belanja Tidak Langsung, Y : Pertumbuhan Ekonomi
	Metode Penelitian	Regresi Linier Berganda
	Hasil Penelitian	Belanja tak langsung memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Artinya semakin tinggi anggaran belanja tak langsung, maka semakin besar pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya semakin kecil anggaran belanja tak langsung maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin kecil, Pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Belanja langsung yang terdiri dari Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal memang sangat terasa bagi pertumbuhan ekonomi daerah karena sifatnya yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat
7	Judul	Dana Alokasi Umum (DAU) Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening
	Peneliti	Stepvani Uhise, (2013)
	Variabel	X1 : Dana Alokasi Umum, X2 : Belanja Modal, Y : Pertumbuhan Ekonomi

	Metode Penelitian	Asosiatif dengan statistik uji analisis jalur
	Hasil Penelitian	DAU tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal dan DAU tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, melalui Belanja Modal. Mengingat saat ini kebutuhan fiskal untuk melakukan pelayanan publik pada pemerintah daerah semakin besar, maka sebaiknya pemerintah daerah mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah sebagai bentuk perwujudan kemandirian fiskal.
8	Judul	Pengaruh DAU, DAK, PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kota Manado Tahun 2001-2013
	Peneliti	Meilita Lukitasari, (2016)
	Variabel	X1 : DAU, X2: DAK, X3: PAD, Y1 : Pertumbuhan Ekonomi, Y2: Kemiskinan
	Metode Penelitian	Analisis jalur/Path analysis dengan model regresi linier berganda
	Hasil Analisis	Secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Dana Alokasi Khusus tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). Secara simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan Kemiskinan.
9	Judul	Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia
	Peneliti	Alexandra Hukom, Diah Komariah, Mukhammad Yogiandoro, 2019
	Variabel	X1 : Belanja Modal, X2 : Pertumbuhan Ekonomi, Y : Indeks Pembangunan Manusia
	Metode Penelitian	Analisis Regresi Berganda
	Hasil Analisis	Secara parsial belanja modal tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM, sementara pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten Kotawaringin Timur periode tahun 2009-2017

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, penelitian yang dilakukan oleh Deviani (2016) dan Teguh Rahayu (2016) hanya sebatas analisis deskriptif kuantitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini selain menggunakan analisis deskriptif, penelitian ini juga menguji hipotesis pengaruh antar variabel. Selain itu jumlah variabel dalam penelitian ini lebih banyak sehingga dapat diketahui variabel mana yang dapat memberikan kontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut.

Dan perbedaan yang dilakukan oleh Wulan Fauzi (2013) dengan penelitian yang dilakukan saat ini, hanya sebatas perbedaan kurun waktu penelitian yang diteliti dan sampel penelitian yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Wulan Fauzi (2013), hanya melakukan penelitian sebanyak 9 tahun, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini yaitu sebanyak 5 tahun. Untuk objek penelitian yang dilakukan, penelitian Wulan Fauzi (2013) sampel yang digunakan yaitu seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan, penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan sampel seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

2.3 Kerangka Berpikir

APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pertumbuhan ekonomi tentunya tidak lepas dari peran serta pemerintah sebagai pengambil kebijakan serta kuasa penggunaan anggaran untuk dapat merangsang

perekonomian menuju ke arah yang lebih baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tentunya diharapkan akan mempercepat roda perekonomian.

APBD terbagi ke dalam pendapatan dan belanja. Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Menurut Setiawati dan Hamzah (2007) adanya kenaikan PAD akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas-aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa dan sektor-sektor lainnya. Wujud dari perimbangan keuangan tersebut adalah adanya dana perimbangan yang bersumber dari APBN.

Dana perimbangan tersebut meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil. Ketiga dana tersebut bersama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat daerah. Perbedaan PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal antara daerah yang satu dengan daerah yang lain akan berdampak pada perbedaan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan antar daerah.

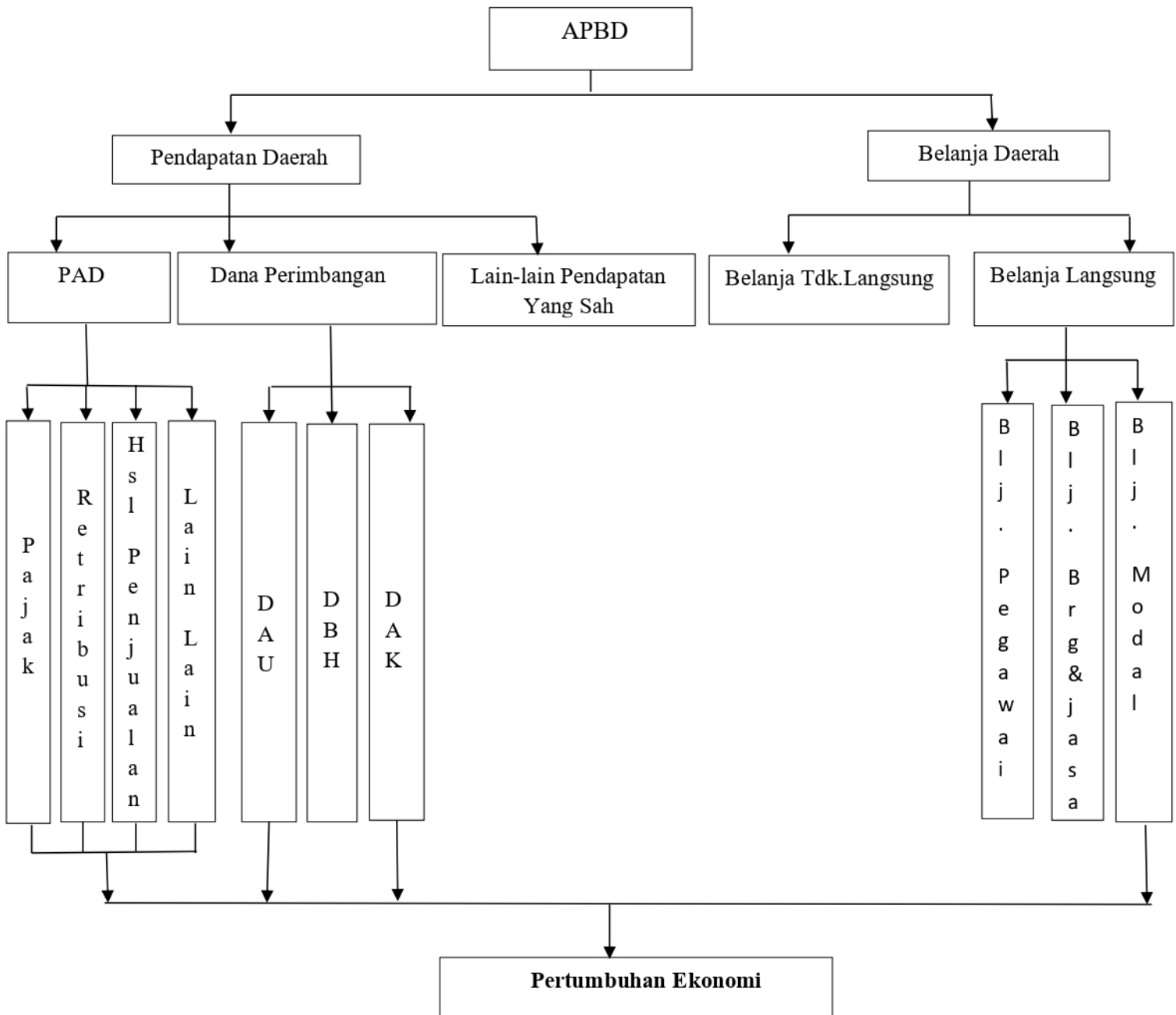
Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di suatu wilayah, diperlukan Pendapatan Asli Daerah di wilayah tersebut, dimana PAD merupakan sumber dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber

daya yang dimiliki oleh daerah tersebut dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan suatu daerah serta mendorong aktivitas perekonomian suatu daerah.

Semakin tinggi pendapatan suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah, sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pajak meningkat dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka dana yang dimiliki daerah meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan lebih berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah-daerah yang dimiliki. Salah satunya memberi proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan dengan infrastruktur, sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah akan lebih berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan penambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Belum memadainya PAD yang dimiliki oleh daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk berpikir kreatif. Investasi, salah satunya dengan melakukan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengundang hadirnya investor.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu

penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau salah.

Supranto mengatakan hipotesis adalah penjelasan sementara yang harus diuji kebenarannya mengenai masalah yang diteliti, dimana hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang dihubungkan dalam dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis guna memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kab/kota Kalimantan Tengah
2. Diduga Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kab/kota Kalimantan Tengah
3. Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kab/kota Kalimantan Tengah
4. Diduga Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kab/kota Kalimantan Tengah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dimana di dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan ilmiah terhadap keputusan manajerial dan ekonomi. Pendekatan ini berangkat dari data yang kemudian data ini diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan (Kuncoro, 2007: 1).

3.2 Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Daerah Kalimantan Tengah tahun 2015-2019 Kalimantan Tengah terdiri dari 13 (tiga belas) Daerah Kabupaten dan 1 (satu) Daerah Kota. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan.

3.3 Metode Pengumpulan data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel, yaitu gabungan dari data time series dan crossection dari masing-masing Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah

dengan periode waktu 5 tahun yaitu tahun 2015-2019. Metode pengumpulan data, menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Dokumen yang menjadi sumber utama data dalam penelitian ini, yaitu : a) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Kabupaten/Kota, Buku Kalimantan Tengah dalam Angka, b) Buku Kabupaten/Kota Di Kalimantan Tengah Dalam Angka, c) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah. Dokumen-dokumen tersebut diperoleh dari Sekretariat Daerah masing-masing Kabupaten/Kota, Dinas Pendapatan Masing-masing Kabupaten/Kota., Kantor Biro Pusat Statistik (BPS) masing-masing Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007). Penelitian ini memiliki variabel penelitian sebagai berikut :

3.4.1 Variabel Dependen (Y)

Pertumbuhan ekonomi yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah yang dihitung dengan PDRB atas dasar harga konstan dan dinyatakan dalam satuan Miliar Rupiah (Rp).

3.4.2 Variabel Independen (X)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi (Arikunto, 2006:119). Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu :

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- b. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional
- c. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- d. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau

menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pangkat kuadrat terkecil biasa atau Ordinary Least Square (OLS). Inti metode Ordinary Least Square (OLS) adalah mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut (Kuncoro, 2007: 79). Untuk menganalisis pengaruh DAU, DAK, PAD dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah, digunakan pendekatan model persamaan regresi linier berganda, dengan linier berganda dengan formula sebagai berikut (Imam Ghozali, 2011):

$$Y_{it} = b_{0i} X_{1it}^{b_{1i}} X_{2it}^{b_{2i}} X_{3it}^{b_{3i}} X_{4it}^{b_{4i}} \mu_{it} \dots\dots\dots (1)$$

Di mana :

- Y_{it} = Jumlah PDRB Kabupaten/ Kota-i pada tahun-t (Rp juta)
- X_{1it} = Jumlah DAU Kabupaten/ Kota-i tahun-t (Rp Juta)
- X_{2it} = Jumlah DAK Kabupaten/ Kota-i tahun-t (Rp juta)
- X_{3it} = Jumlah PAD Kabupaten/ Kota-i Tahun-t (Rp Juta)
- X_{4it} = Jumlah Belanja Modal Kabupaten/ Kota-i Tahun-t (Rp Juta)
- μ_{it} = Error Term
- b_i = Koefisien regresi variabel X_{ij}
- T = tahun (2015-2019)
- i = 1, 2, 314 (Jumlah Kabupaten/Kota)

Persamaan di atas ditransformasi ke dalam bentuk linier, dengan me Ln kan ruas kiri dan ruas kanan persamaan sebagai berikut :

$$\ln Y_{it} = \ln b_{0i} + \ln X_{1it}^{b_{1i}} + \ln X_{2it}^{b_{2i}} + \ln X_{3it}^{b_{3i}} + \ln X_{4it}^{b_{4i}} + \ln \mu_{it} \dots\dots (2)$$

$$\ln Y_{it} = \ln b_{oi} + b_{1i} \ln X_{1it} + b_{2i} \ln X_{2it} + b_{3i} \ln X_{3it} + b_{4i} \ln X_{4it} + \ln \mu_{it} \dots (3)$$

$$\ln y_{it} = B_{oi} + b_{1i} x_{1it} + b_{2i} x_{2it} + b_{3i} x_{3it} + b_{4i} x_{4it} + e_{it} \dots (4)$$

Di mana :

- $B_{oi} = \ln b_{oi}$
- $x_{1it} = \ln X_{1it}$
- $x_{2i} = \ln X_{2it}$
- $x_{3it} = \ln X_{3it}$
- $x_{4i} = \ln X_{4it}$

Metode yang digunakan untuk menentukan parameter persamaan regresi di atas menggunakan pendekatan statistik dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Metode OLS memiliki kemampuan untuk menganalisis pengaruh beberapa variable independen terhadap variable dependen, karena OLS memiliki sifat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE). Dan untuk menemukan parameter-parameter dalam model tersebut, digunakan bantuan komputer dengan menggunakan program SPSS.

Hasil analisis yang diperoleh sebelum diinterpretasikan, terlebih dahulu dilakukan uji pelanggaran asumsi klasik, kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis, baik pengujian secara bersama maupun pengujian secara parsial.

3.5.1 Pengujian Pelanggaran Asumsi Klasik dan Pengujian Hipotesis

Dalam penggunaan regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang dapat menghasilkan estimator linear tidak bias atau BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) yang terbaik dari model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa atau OLS (*Ordinary Least Square*).

Dengan terpenuhinya asumsi tersebut, maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataan, dimana asumsi – asumsi dasar itu dikenal sebagai asumsi klasik (Hasan, 2008: 280). Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui, apakah didalam model analisis ditemukan pelanggaran terhadap asumsi klasik, yaitu ; Normalitas, Multikolinieritas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi Pengujian dilakukan sebagai berikut :

1. Uji Normalitas Data

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atautkah tidak. Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka ($n > 30$), maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Menurut Ghazali (2005) bahwa, jika variabel independen saling berkorelasi maka, variabel ini tidak ortogonal. Untuk mendeteksi

ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF), jika nilai tolerance $< 0,10$ atau nilai VIF > 10 berarti terdapat multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah ada data yang penyimpangannya terlalu jauh (*outlayer*). Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari tingkat signifikan secara statistik (α lebih kecil dari 5%) terhadap nilai residual yang diperlakukan sebagai variabel dependen, maka variabel independen tersebut menunjukkan adanya heteroskedastisitas, dan demikian pula sebaliknya.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan tersusun dalam rangkaian waktu (*times series*) dan dalam rangkaian ruang (*cross section*). Untuk mengetahui dan menguji ada tidaknya autokorelasi dalam model analisis regresi, bisa digunakan cara pengujian statistik Durbin Watson (DW).

Santoso (2000) mengemukakan secara umum untuk mendeteksi adanya autokorelasi bisa diambil patokan :

1. Angka D-W < dL, berarti ada autokorelasi positif
2. Angka D-W di antara Du dan 4-dU, berarti tidak ada autokorelasi
3. Angka D-W di antara 4-dU dan 4-dL, berarti tidak ada kesimpulan.

3.5.2 Pengujian Hipotesis

a Pengujian secara bersama

Persamaan regresi yang ditemukan terlebih dahulu dilakukan pengujian model dengan menggunakan uji bersama yaitu dengan menggunakan uji F statistik (*Fisher test*), dengan rumus sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)} \dots\dots\dots (5)$$

Di mana :

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah pengamatan

Hipotesis :

$H_0 : b_0 = b_{1i} \dots b_{3i} = 0$: Secara bersama-sama variabel jumlah DAU (X_{1i}), DAK (X_{2i}), PAD (X_{3i}), dan jumlah Belanja Modal (X_{4i}) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah (Y_t).

$H_0 : b_0 \neq b_{1i} \dots b_{3i} \neq 0$: Secara bersama-sama variabel jumlah DAU (X_{1i}), DAK (X_{2i}), PAD (X_{3i}), dan jumlah Belanja Modal (X_{4i}) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah (Y_t).

Kaidah pengujian :

Pengujian secara statistika dilakukan hingga tingkat keyakinan 95% atau $\alpha = 5\% = 0,05$, dengan derajat bebas (*degree of freedom*) = $(n-k)$ (k). Nilai $F(\alpha ; n-k, k)$, diperoleh dari tabel statistika, sehingga kaidah pengujian dapat disimpulkan sebagai berikut :

Jika ; $F_{hitung} \leq F(\alpha ; n-k, k)$: Maka H_0 diterima H_a ditolak, berarti variabel X_{it} secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah.

Jika ; $F_{hitung} > F(\alpha ; n-k, k)$: Maka H_0 ditolak H_a diterima, berarti variabel X_{it} secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah (Y_t).

Koefisien Determinasi (R^2) :

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat seberapa besar variasi variabel X_{it} (*independen*) secara bersama-sama mampu memberikan penjelasan mengenai variasi variabel pertumbuhan ekonomi (Y_t). Formula menghitung koefisien determinasi adalah sebagai berikut :

$$R^2 = (TSS-SSE)/TSS = SSR/TSS$$

Persamaan di atas menunjukkan proporsi total jumlah kuadrat (TSS) yang diterangkan oleh variabel independen dalam model. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model, formulasi model yang keliru, dan kesalahan eksperimental (Mendenhall et al. dalam Koncoro, 2007:84). Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

b Pengujian secara parsial

Uji t-statistik merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi yang diperoleh signifikan berbeda dengan nol atau apakah variabel yang diuji mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Nilai t_{hitung} diperoleh dengan rumus :

$$t_{\text{hitung}} = \frac{b_i - b}{S_{b_i}} \dots\dots\dots (6)$$

Hipotesis :

$H_0 : b_i = 0$: Variabel X_{it} yang diuji secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah (Y_{it}) dengan asumsi ceteris paribus.

$H_0 : b_i \neq 0$: Variabel X_{it} yang diuji secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah (Y_{it}) dengan asumsi ceteris paribus.

Kaidah pengujian :

Pengujian secara statistika dilakukan hingga tingkat keyakinan 95% atau $\alpha = 5\% = 0,05$, dengan derajat bebas (*degree of freedom*) = $(n-k-1)$. Nilai $t_{(\frac{1}{2}\alpha; n-k-1)}$, diperoleh dari tabel statistika, sehingga kaidah pengujian dapat disimpulkan sebagai berikut :

Jika: $t_{hitung} \leq t_{(\frac{1}{2}\alpha; n-k-1)}$: Maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti variabel X_{it} yang diuji secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah (Y_{it}).

Jika: $t_{hitung} > t_{(\frac{1}{2}\alpha; n-k-1)}$: Maka H_0 ditolak H_a diterima, berarti variabel X_{it} yang diuji secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah (Y_{it}).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Luas Wilayah

Provinsi Kalimantan Tengah dengan ibukota Palangka Raya, terletak antara 0°45' Lintang Utara s.d 3°30' Lintang Selatan dan 111° s.d. 116° Bujur Timur. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua dengan luas wilayah mencapai 153.564 Km². Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 11 (sebelas) sungai besar dan tidak kurang dari 33 (tiga puluh tiga) sungai kecil/anak sungai, keberadaannya menjadi salah satu ciri khas Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun Sungai Barito dengan panjang mencapai 900 Km memiliki kedalaman mencapai 8 m, merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Tengah sehingga dapat dilayari hingga 700 Km. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, Provinsi Kalimantan Tengah yang semula terdiri atas 5 kabupaten dan 1 kota, dimekarkan menjadi 13 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu:

- 1) Kota Palangka Raya dengan Ibukota Palangka Raya
- 2) Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Ibukota Pangkalan Bun
- 3) Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Ibukota Sampit
- 4) Kabupaten Kapuas dengan Ibukota Kuala Kapuas
- 5) Kabupaten Barito Selatan dengan Ibukota Buntok

- 6) Kabupaten Barito Utara dengan Ibukota Muara Teweh
- 7) Kabupaten Lamandau dengan Ibukota Naga Bulik
- 8) Kabupaten Sukamara dengan Ibukota Sukamara
- 9) Kabupaten Seruyan dengan Ibukota Kuala Pembuang
- 10) Kabupaten Katingan dengan Ibukota Kasongan
- 11) Kabupaten Gunung Mas dengan Ibukota Kuala Kurun
- 12) Kabupaten Pulang Pisau dengan Ibukota Pulang Pisau
- 13) Kabupaten Barito Timur dengan Ibukota Tamiang Layang
- 14) Kabupaten Murung Raya dengan Ibukota Puruk Cahu.

Tabel 4.1
Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2019

Kabupaten/kota	Luas (Km ²)	Persen	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
Kotawaringin Barat	10 759,0	7,01	6	13	81
Kotawaringin Timur	16 796,0	10,94	17	17	168
Kapuas	14 999,0	9,77	17	17	216
Barito Selatan	8 830,0	5,75	6	7	86
Barito Utara	8 300,0	5,40	9	10	93
Sukamara	3 827,0	2,49	5	3	29
Lamandau	6 414,0	4,18	8	3	87
Seruyan	16 404,0	10,68	10	3	97
Katingan	17 500,0	11,40	13	7	154
Pulang Pisau	8 997,0	5,86	8	4	95
Gunung Mas	10 805,0	7,04	12	13	115
Barito Timur	3 834,0	2,50	10	3	100
Murung Raya	23 700,0	15,43	10	9	116
Palangka Raya	2 399,0	1,56	5	30	-
Kalimantan Tengah	153 564,5	100,00	136	139	1 437

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten/Kota yang terluas di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Murung Raya dengan luas 23 700,0 km² atau 15,43% dari luas wilayah Povinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan. Sedangkan Kabupaten/Kota yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kota Palangka Raya dengan luas wilayah 2 399,0 atau 1,56% terhadap luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Batas Provinsi Kalimantan Tengah di bagian utara yaitu sabuk pegunungan Muller Schwanner, paling tidak 52 bukit, dari ketinggian 343 meter yaitu Bukit Ancah sampai 2278 meter yaitu Bukit Raya. Bukit Batu Tatau dengan ketinggian 1652 meter paling ujung perbatasan Kalimantan Tengah - Kalimantan Timur. Titik tertinggi wilayah Kalimantan Tengah terdapat di Gunung Batu Sambang dengan ketinggian hingga 1660 Meter dpl.

Batas Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

- Utara : Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur
- Selatan : Berbatasan dengan Laut Jawa
- Timur : Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan
- Barat : Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat.

4.1.2 Topografi

Kondisi fisik wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas daerah pantai dan rawa yang terdapat di wilayah Bagian Selatan sepanjang ± 750 km pantai Laut Jawa, yang membentang dari Timur ke

Barat dengan ketinggian antara 0–50 m diatas permukaan laut (dpl) dan tingkat kemiringan 0%-8%.

Tabel 4.2
Penyebaran dan Luas Masing-masing Kelas Ketinggian Wilayah Daratan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kelas Ketinggian (m dpl)	Luas (Ha)	Persentase
1	0 – 7	2.105.510	13,69
2	7 -25	2.269.717	14,76
3	25 – 100	6.398.923	41,66
4	100 – 500	3.327.459	21,63
5	> 500	1.278.391	8,31

Sumber : Website Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah

Sementara itu wilayah daratan dan perbukitan berada pada bagian tengah, sedangkan pegunungan berada di bagian Utara dan Barat Daya dengan ketinggian 50 – 100 dpl dan tingkat kemiringan rata-rata sebesar 25%.

Tabel 4.3
Luas Masing-masing Kelas Kemiringan Wilayah Daratan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kelas Lereng (%)	Luas (Ha)	Persentase
1	0 – 8 (Datar)	6,940,144.05	46.12
2	8 – 15 (Landai)	1,552,839.80	10.32
3	15 – 25 (Agak Curam)	3,977,865.28	25.44
4	25 – 40 (Curam)	1,694,814.85	11.26
5	> 40 (Sangat Curam)	881,357.24	5.86

Sumber : Website Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas 6 wilayah fisiografi, tetapi didominasi oleh daratan dan perbukitan pedalaman.

Tabel 4.4
Wilayah Fisiografi di Provinsi Kalimantan Tengah

No	Wilayah	Luas (Km ²)
1	Daratan rendah pasir	36.870
2	Undak – undak pedalaman	37.310
3	Daratan dan perbukitan pedalaman	57.124
4	Pegunungan Schwaner	9.000
5	Pegunungan Muller	11.000
6	Pegunungan Meratus	2.300

Sumber : Website Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah

4.1.3 Keadaan Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Dari hasil proyeksi penduduk menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah meningkat dari tahun 2015 berjumlah 2.495.035, pada tahun 2016 berjumlah 2.550.192, pada tahun 2017 berjumlah 2.605.274, pada tahun 2018 berjumlah 2.660.209 dan pada tahun 2019 berjumlah 2.714.859 jiwa. Dengan kata lain selama kurun satu tahun penduduk Kalimantan Tengah bertambah sebanyak 54.650 jiwa. Keterangan Proyeksi penduduk Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Proyeksi Penduduk Menurut Kab/Kota Kalimantan Tengah
dan Jenis Kelamin Laki-laki dan Perempuan Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kotawaringin Barat	278.141	286.714	295.349	304.082	312.911
Kotawaringin Timur	426.176	436.276	446.094	456.409	466.366
Kapuas	348.049	351.043	353.844	356.382	358.820
Barito Selatan	131.987	133.304	134.543	135.736	136.796
Barito Utara	127.479	128.400	129.287	130.019	130.713
Sukamara	55.321	57.504	59.775	62.044	64.342
Lamandau	73.975	76.160	78.341	80.512	82.680
Seruyan	174.859	182.307	189.975	197.839	205.880
Katingan	160.305	162.837	165.306	167.706	169.997
Pulang Pisau	124.845	125.484	126.181	126.657	127.118
Gunung Mas	109.947	112.484	115.054	117.457	119.910
Barito Timur	113.696	116.946	120.254	123.557	126.874
Murung Raya	110.390	112.976	115.604	118.197	120.785
Palangka Raya	259.865	267.757	275.667	283.612	291.667
Jumlah	2.495.035	2.550.192	2.605.274	2.660.209	2.714.859

Sumber : BPS Kalimantan Tengah Tahun 2019

Pada tabel 4.6 dapat dilihat distribusi penduduk Kabupaten/Kota provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2015-2019. Distribusi di setiap Kabupaten/Kota ada yang meningkat dari tahun ke tahun seperti Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Sukamara, Lamandau, Seruyan, Barito Timur, dan Palangka Raya. Sedangkan Kabupaten yang mengalami penurunan yaitu Kapuas, Barito Selatan, Barito Utara, Pulang Pisau.

Tabel 4.6**Distribusi Penduduk (Persen) Kab/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019**

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kalimantan Tengah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kotawaringin Barat	11,15	11,24	11,34	11,43	11,53
Kotawaringin Timur	17,08	17,11	17,12	17,16	17,18
Kapuas	13,95	13,77	13,58	13,40	13,22
Barito Selatan	5,29	5,23	5,16	5,10	5,04
Barito Utara	5,11	5,03	4,96	4,89	4,81
Sukamara	2,22	2,25	2,29	2,33	2,37
Lamandau	2,96	2,99	3,01	3,03	3,05
Seruyan	7,01	7,15	7,29	7,44	7,58
Katingan	6,42	6,39	6,35	6,30	6,26
Pulang Pisau	5,00	4,92	4,84	4,76	4,68
Gunung Mas	4,41	4,41	4,42	4,42	4,42
Barito Timur	4,56	4,59	4,62	4,64	4,67
Murung Raya	4,42	4,43	4,44	4,44	4,45
Palangka Raya	10,42	10,50	10,58	10,66	10,74

Sumber : BPS Kalimantan Tengah Tahun 2020

4.1.4 Keadaan Perekonomian

Kondisi dan arah ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu motivasi yang menggerakkan pelaku ekonomi di Kalimantan Tengah. Meskipun tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi masa depan dalam hal ini pemerintah, dan pelaku ekonomi selalu mencari tanda-tanda perubahan yang mungkin mempengaruhi perekonomian di masa depan melalui indikator-indikator ekonomi yang diantaranya dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ketika indikator-indikator

ekonomi yang rilis melebihi atau gagal dari ekspektasi, mereka bereaksi berdasarkan indikator – indikator ekonomi yang dirilis tersebut.

4.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tujuan pembangunan secara makro adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dengan adanya kestabilan perekonomian domestik yang baik merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh setiap negara melalui adanya kebijakan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dapat membangkitkan sektor-sektor ekonomi produktif seperti ketersediaan sektor-sektor lapangan usaha melalui penggunaan faktor-faktor produksi yang akan menghasilkan barang maupun jasa (Sanjaya et al., 2017).

Sebagai pengukuran agregat dari total produksi ekonomi untuk suatu daerah atau regional, PDRB mencerminkan nilai pasar dari semua barang dan layanan yang dihasilkan oleh seluruh pelaku ekonomi selama periode tertentu. PDRB menyajikan banyak indikator dengan sangat komprehensif dan rinci yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku ekonomi dan pemerintah. Tabel PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.7
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2019

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kotawaringin Barat	10 112 713,5	14 932 757,0	11 432 688,7	12 171 160,2	12 875 812,3
Kotawaringin Timur	13 835 677,8	10 704 711,7	16 118 192,4	17 234 856,6	18 468 087,1
Kapuas	8 241 408,5	8 842 069,6	9 515 602,2	10 182 288,5	10 910 917,6
Barito Selatan	3 554 129,6	3 754 054,9	3 958 245,8	4 160 875,1	4 365 953,7
Barito Utara	5 696 609,8	6 008 577,3	6 369 617,4	6 748 596,7	7 114 495,9
Sukamara	2 243 525,9	2 381 089,9	2 530 336,2	2 686 337,8	2 848 949,2
Lamandau	2 882 203,3	3 074 911,4	3 280 863,8	3 505 911,0	3 747 248,1
Seruyan	4 943 248,3	5 196 334,8	5 465 511,1	5 750 252,3	6 048 859,7
Katingan	3 990 904,8	4 251 997,9	4 531 079,0	4 829 628,2	5 110 045,9
Pulang Pisau	2 682 506,7	2 845 265,5	3 011 275,2	3 190 169,7	3 393 327,9
Gunung Mas	2 678 816,1	2 866 190,0	3 056 181,1	3 266 129,5	3 504 388,4
Barito Timur	4 275 067,0	4 509 974,3	4 779 685,7	5 052 798,0	5 327 941,2
Murung Raya	4 684 225,0	4 953 891,0	5 244 659,4	5 538 869,4	5 867 650,2
Palangka Raya	8 286 033,4	8 859 548,2	9 479 165,6	10 154 119,2	10 881 804,9
Kalimantan Tengah	78 891,0	83 900,2	89 544,9	94 600,9	100 428,7

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa PDRB di setiap Kabupaten/Kota meningkat setiap tahunnya. Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan penyumbang PDRB yang paling besar diantara beberapa Kabupaten lainnya yaitu mencapai sekitar 18 468 087,1 pada tahun 2019, PDRB terbesar kedua yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, sedangkan terbesar ketiga yaitu Kabupaten Kapuas ini merupakan total Nilai Tambah Bruto (NTB) yang dibentuk oleh seluruh kategori-kategori ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah.

Beberapa daerah memiliki rasio kemandirian fiskal tinggi, sedangkan sebagian besar lainnya masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Proporsi dana transfer ke daerah masih didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU), dan terbesar kedua adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), dan kemudian di ikuti oleh Dana Bagi Hasil (DBH). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah untuk menyediakan layanan masyarakat, sekaligus menjadi instrumen fiskal di daerah. Alexandra.H (2020)

4.1.6 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi yang dibangun oleh kategori-kategori produksi bergerak menjadi kekuatan ekonomi. Kategori dengan NTB (Nilai Tambah Bruto) terbesar akan menjadi tulang punggung perekonomian suatu daerah dan semakin besar NTB suatu kategori maka semakin besar pula tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap kategori ekonomi tersebut. (BPS Kalimantan Tengah).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan merupakan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah melihat besaran yang dihasilkan, untuk gambaran yang komprehensif tentang perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah, maka dapat dilihat lebih dalam pada strukturnya. Struktur Ekonomi menggambarkan komposisi dari berbagai lapangan usaha atau kategori dalam membentuk perekonomian suatu wilayah, dari struktur dapat diketahui lapangan

usaha mana yang dominan dalam perekonomian. Pada Lampiran I dapat kita lihat bahwa besarnya sumbangan Kategori Jasa Perusahaan terhadap PDRB Kalimantan Tengah menunjukkan nilai yang rendah dari semua kategori yang ada. Hal ini berarti bahwa, Jasa Perusahaan tidak terlalu berkontribusi di Provinsi Kalimantan Tengah. Rendahnya kontribusi Kategori Jasa Perusahaan ini tidak berarti bahwa NTB yang dibentuk oleh kategori ini menurun, tetapi lebih disebabkan oleh meningkatnya kontribusi pada kategori-kategori lainnya. Peranan kelompok kategori yang lainnya mengalami peningkatan selama periode 2015-2019. Meningkatnya arus barang dan aktivitas ekonomi masyarakat mendorong peningkatan kontribusi kelompok kategori ini.

Adapun lima kategori ekonomi yang merupakan tulang punggung perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kategori A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kategori pada posisi ke dua adalah Kategori B, Pertambangan dan Penggalian. Pada posisi ke tiga adalah Kategori C, Industri Pengolahan. Berturut-turut pada posisi empat dan lima adalah Kategori G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan F, Konstruksi.

4.1.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penyumbang PDRB terbesar adalah Kabupaten Barito Utara yaitu mencapai 71.02 Juta Rupiah pada tahun 2018. Sedangkan Kabupaten Pulang Pisau merupakan penyumbang terendah

diantara Kabupaten lainnya yaitu mencapai 29.23 pada tahun 2015 sampai 38.61 Juta Rupiah pada tahun 2018. PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini :

Tabel 4.8
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah 2015-
2019

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kotawaringin Barat	47.2	50.8	55.3	58.6	61.8
Kotawaringin Timur	40.6	45.0	50.2	53.8	57.5
Kapuas	30.9	34.2	38.3	42.6	46.3
Barito Selatan	33.7	36.7	40.2	43.8	46.5
Barito Utara	52.6	57.3	63.8	70.9	75.0
Sukamara	52.1	55.7	59.9	62.7	65.2
Lamandau	49.5	53.5	57.8	62.2	66.4
Seruyan	35.8	37.9	39.9	40.7	41.6
Katingan	34.2	37.6	41.2	44.9	48.5
Pulang Pisau	29.2	32.1	35.2	38.5	41.7
Gunung Mas	34.4	37.6	40.8	44.0	47.9
Barito Timur	44.8	48.1	52.6	57.0	59.5
Murung Raya	50.6	54.4	59.1	65.0	68.5
Palangka Raya	43.4	47.8	52.7	58.3	62.6

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah

4.1.8 Keadaan Keuangan Daerah

Pendapatan daerah merupakan sumber dana utama dalam pembiayaan pembangunan atau belanja daerah. Pada tahun 2019, Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meningkat lebih dari satu triliun rupiah dibanding tahun 2018 menjadi 5,0 triliun. Pendapatan tersebut 36 persen berasal dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD), 64 persen dari dana perimbangan, dan satu persen sisanya dari lain-lain.

Sementara itu, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 melambat hingga 5,1 triliun rupiah atau sedikit lebih tinggi dari penerimaan pemerintah. Artinya terjadi defisit anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 sebesar 96 Miliar. Baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung menurun sekitar 361 miliar dari total belanja tahun 2018.

Tabel 4.9
Realisasi Penerimaan dan Belanja Kalimantan Tengah

Anggaran	2017	20018	2019
Penerimaan (Miliar Rp)	4 098	4 678	5 000
PAD	1 342	1 616	1 785
Dana Perimbangan	2 728	3 038	3 178
Lain-lain	28	24	37
Belanja (Miliar Rp)	3 687	5 457	5 096
Belanja Tidak Langsung	2 167	2 666	2 510
Belanja Langsung	1 520	2 791	2 586

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2020

4.1.9 Keadaan Dana Alokasi Umum Provinsi Kalimantan Tengah

Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam Lampiran IV. Pada Tahun 2015-2019 Realisasi DAU paling besar pertama adalah Kabupaten Kapuas, Pada tahun 2019 realisasi DAU paling besar pertama adalah Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada tahun 2015-2019 Realisasi DAU paling besar kedua adalah Kabupaten Kotawaringin

Timur. Sedangkan yang berada pada urutan ketiga terbesar dilihat dari tahun 2015-2019 yaitu Kabupaten Katingan.

Realisasi DAU paling rendah pertama jika dilihat dari tahun 2015-2019 yaitu Kabupaten Sukamara, Realisasi DAU paling rendah urutan kedua jika dilihat dari tahun 2015-2019 yaitu Kabupaten Lamandau. Sedangkan yang berada pada urutan ketiga terendah jika dilihat dari tahun 2015-2019 yaitu Kabupaten Barito Timur.

Penggunaan Dana Alokasi Umum diharapkan mampu untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerintah Daerah sebaiknya memenuhi kebutuhan konsumtif seperti Belanja Pegawai dibanding kebutuhan produktif yaitu pembangunan infrastruktur agar tercipta pertumbuhan ekonomi masing-masing Kabupaten/Kota yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.1.10 Keadaan Dana Alokasi Khusus Provinsi Kalimantan Tengah

Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat dalam Lampiran IV. Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah yang paling besar pertama jika dilihat dari tahun 2015-2019 yaitu Kabupaten Kapuas, Realisasi DAK Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah yang paling besar kedua pada tahun 2015 adalah Kabupaten Lamandau, pada tahun 2016 yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, pada tahun 2017 yaitu Kabupaten Gunung Mas, pada tahun 2018 yaitu Kabupaten Katingan, sedangkan pada tahun 2019 yaitu Kabupaten Kotawaringin

Timur. Sedangkan Realisasi DAK Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di urutan ketiga terbesar yaitu pada tahun 2015 Kabupaten Pulang Pisau, Pada tahun 2016 Kabupaten Lamandau, Pada tahun 2017 Kabupaten Kotawaringin Barat, Pada tahun 2018 Kabupaten Pulang Pisau, Pada tahun 2019 Kabupaten Kotawaringin Barat.

Realisasi DAK Provinsi Kalimantan Tengah yang paling rendah pertama pada tahun 2015 yaitu Kabupaten Murung Raya, Pada tahun 2016 Kota Palangka Raya, Pada tahun 2017 Kabupaten Gunung Mas, Pada Tahun 2018 Kabupaten Lamandau, Pada Tahun 2019 Kabupaten Barito Selatan. Yang berada dalam urutan kedua terendah yaitu pada tahun 2015 Kabupaten Seruyan, Pada tahun 2016 Kabupaten Seruyan, Pada tahun 2017 Kabupaten Lamandau, Pada tahun 2018 Kabupaten Barito Timur, Pada tahun 2019 Kabupaten Barito Timur. Realisasi DAK Provinsi Kalimantan Tengah paling rendah dalam urutan ketiga dilihat dari tahun 2015 yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Pada tahun 2016 Kabupaten Katingan, Pada tahun 2017 Kabupaten Lamandau, Pada tahun 2018 Kabupaten Sukamara. Pada tahun 2019 Kabupaten Sukamara.

Tujuan diberikannya Dana Alokasi Khusus untuk membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Jika sarana dan prasarana di daerah itu memadai maka masyarakat akan dapat melaksanakan aktifitas pekerjaan sehingga akan berdampak positif terhadap roda

perekonomian sehingga akan berpengaruh pada produktifitas yang akan semakin meningkat.

4.1.11 Keadaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam Lampiran IV. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah paling besar dalam urutan pertama dilihat dalam tahun 2015-2019 yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah paling besar dalam urutan kedua dilihat dalam tahun 2015-2019 yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan yang termasuk terbesar dalam urutan ketiga dari tahun 2015-2016 yaitu Kota Palangka Raya, Pada tahun 2017 Kabupaten Lamandau, Pada tahun 2018 yaitu Kota Palangka Raya, Pada tahun 2019 yaitu Kabupaten Kapuas.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah yang paling rendah urutan pertama pada tahun 2015 yaitu Kabupaten Sukamara, Pada tahun 2016 yaitu Kabupaten Murung Raya, Pada tahun 2017 yaitu Kabupaten Pulang Pisau, Pada tahun 2018 yaitu Kabupaten Gunung Mas, Pada tahun 2019 yaitu Kabupaten Sukamara. Yang berada dalam urutan kedua terendah pada tahun 2015 yaitu Kabupaten Gunung Mas, Pada tahun 2016 yaitu Kabupaten Barito Timur, Pada tahun 2017 yaitu Kabupaten Gunung Mas, Pada tahun 2018 yaitu Kabupaten Pulang Pisau, Pada tahun 2019 yaitu Kabupaten Barito Utara. Yang menduduki posisi ketiga terendah

pada tahun 2015 yaitu Kabupaten Barito Timur, Pada tahun 2016 yaitu Kabupaten Gunung Mas, Pada tahun 2017 yaitu Kabupate Barito Selatan, Pada tahun 2018 yaitu Kabupaten Sukamara, Pada tahun 2019 yaitu Kabupaten Barito Timur.

Pemerintah daerah sebaiknya menggunakan sumber daya dan potensi daerah untuk tujuan pembangunan daerah melalui pengelolaan APBD yang efektif dan produktif dengan mengurangi belanja konsumtif, meningkatkan PAD dan memperbesar alokasi belanja modal guna mendorong percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sumardjoko, 2017).

4.1.12 Keadaan Belanja Modal Provinsi Kalimantan Tengah

Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam Lampiran IV. Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah yang paling besar dalam urutan pertama dari tahun 2015-2019 yaitu Kabupaten Kapuas, Pada tahun 2019 yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat. Yang menduduki posisi kedua terbesar pada tahun 2015 yaitu Kabupaten Barito Utara, Pada tahun 2016 yaitu Kabupaten Murung Raya, Pada tahun 2017 yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Pada tahun 2018 yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Pada tahun 2019 yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur. Posisi ketiga terbesar pada tahun 2015 yaitu Kabupaten Murung Raya, Pada tahun 2016 yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Pada tahun 2017 yaitu Kabupaten Barito Utara,

Pada tahun 2018 yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Pada tahun 2019 yaitu Kabupaten Kapuas.

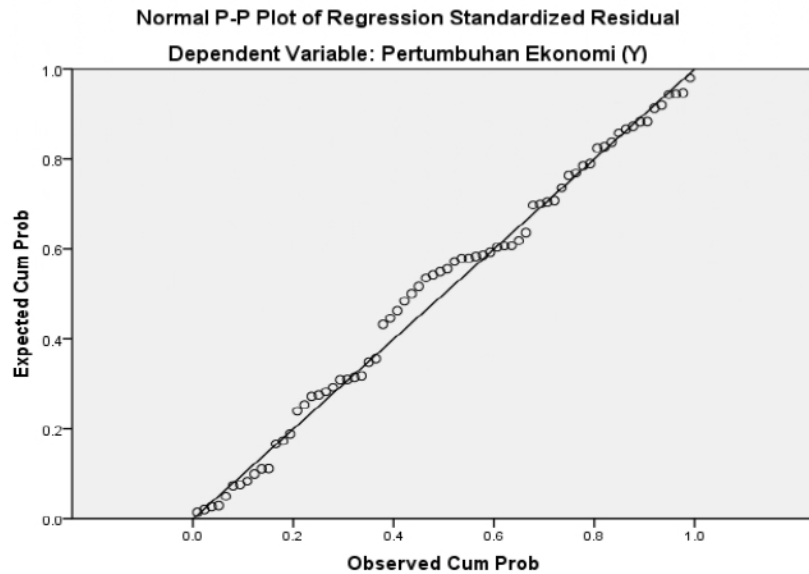
Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah yang menduduki posisi pertama terendah dilihat pada tahun 2015-2019 yaitu Kabupaten Barito Timur. Yang menduduki posisi kedua terendah dilihat pada tahun 2015-2017 yaitu Kabupaten Barito Selatan, Pada tahun 2018-2019 yaitu Kabupaten Lamandau. Yang menduduki posisi ketiga terendah pada tahun 2015-2016 yaitu Kota Palangka Raya, Pada tahun 2017 yaitu Kabupaten Murung Raya, Pada tahun 2018 yaitu Kabupaten Barito Selatan, Pada tahun 2019 yaitu Kabupaten Murung Raya.

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1. Uji Normalitas Data

Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui data yang diperoleh harus dilakukan uji normalitas terhadap data yang bersangkutan (Nugroho, 2005). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan analisis Grafik.

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas Data



Sumber : Hasil SPSS 18

Analisis :

- Normal P-P Plot Regression Standardized

Berdasarkan tampilan normal P-P Regression Standardized terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal. Oleh karena itu berdasarkan uji normalitas, analisis regresi layak digunakan meskipun terdapat sedikit plot yang menyimpang dari garis diagonal.

4.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi, dimana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Dalam uji ini menggunakan metode Spearman's rho. Pedoman uji Spearman's rho adalah jika nilai sig. 2-tailed ($> 0,05$) maka kesimpulannya tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas, demikian pula sebaliknya.

Tabel 4.10
Hasil Uji Heteroskedastisitas

			Correlations				
			LN_DAU	LN_DAK	LN_PAD	LN_BM	Unstandardized Residual
Spearman's rho	LN_DAU	Correlation Coefficient	1.000	.383**	.550**	.386**	.021
		Sig. (2-tailed)	.	.001	.000	.001	.861
		N	70	70	70	70	70
		<hr/>					
	LN_DAK	Correlation Coefficient	.383**	1.000	.256*	.389**	.016
		Sig. (2-tailed)	.001	.	.032	.001	.894
		N	70	70	70	70	70
		<hr/>					
	LN_PAD	Correlation Coefficient	.550**	.256*	1.000	.047	.069
		Sig. (2-tailed)	.000	.032	.	.697	.571
		N	70	70	70	70	70
		<hr/>					
	LN_BM	Correlation Coefficient	.386**	.389**	.047	1.000	-.028
		Sig. (2-tailed)	.001	.001	.697	.	.818
		N	70	70	70	70	70
		<hr/>					
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.021	.016	.069	-.028	1.000
		Sig. (2-tailed)	.861	.894	.571	.818	.
		N	70	70	70	70	70
		<hr/>					

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : Hasil SPSS 18

Dari hasil output uji Spearman's rho diatas dapat dilihat bahwa variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal mempunyai nilai signifikan lebih besar dari 0,05 artinya dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas.

4.2.3 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terdapat atau terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Metode yang digunakan dalam uji multikolinieritas yaitu menggunakan metode TOL (Tolerance) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel terikatnya. Jika nilai VIF < 10 maka model dinyatakan tidak terdapat gejala multikolinieritas, dan jika nilai Tolerance > 0,10 maka model dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas begitu juga sebaliknya.

Tabel 4.11
Uji Multikolinieritas metode TOL dan VIF
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-15.257	5.120		-2.980	.004		
LN_DAU	.275	.224	.153	1.227	.224	.732	1.365
LN_DAK	.051	.136	.046	.376	.708	.767	1.303
LN_PAD	.296	.116	.315	2.561	.013	.752	1.329
LN_BM	.503	.209	.267	2.409	.019	.926	1.080

a. Dependent Variable : Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Hasil Spss 18

Berdasarkan output Spss diatas dapat diketahui bahwa :

1. Nilai VIF Dana Alokasi Umum (X1) sebesar $1.365 < 10$ maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak terjadi multikolinieritas.

2. Nilai VIF Dana Alokasi Khusus (X2) sebesar $1.303 < 10$ maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak terjadi multikolinieritas.
3. Nilai VIF Pendapatan Asli Daerah (X3) sebesar $1.329 < 10$ maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak terjadi multikolinieritas.
4. Nilai VIF Belanja Modal (X4) sebesar $1.080 < 10$ maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal tidak terjadi multikolinieritas.

4.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah uji Durbin Watson (DW test).

Tabel 4.12
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.508 ^a	.758	.213	.70221	1.187
.....					

a. Predictors: (Constant), LN_BM, LN_PAD, LN_DAK, LN_DAU

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Hasil SPSS 18

Uji autokorelasi dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika $DW < dL$ atau $> 4-dL$, berarti terjadi autokorelasi
2. Jika DW terletak antara dU dan $4-dU$, berarti tidak terjadi autokorelasi
3. Jika DW terletak antara dL dan dU atau diantara $4-dU$ dan $4-dL$, berarti tidak ada kesimpulan yang pasti.

Dari tabel 4.12 dapat diketahui bahwa hasil uji autokorelasi pada model regresi ini menunjukkan angka Durbin Watson $1.187 < dL$ sebesar 1.494 maka model tersebut terjadi autokorelasi. Jika hasil menunjukkan adanya gejala autokorelasi bisa menggunakan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala autokorelasi misalnya dengan uji run tes dengan SPSS.

Tabel 4.13
Hasil Uji Run Tes

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.09382
Cases < Test Value	35
Cases \geq Test Value	35
Total Cases	70
Number of Runs	25
Z	-2.649
Asymp. Sig. (2-tailed)	.010

a. Median

Sumber : Hasil SPSS 18

Dasar pengambilan keputusan dalam uji Run Tes yaitu :

1. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil dari $< 0,05$ maka terdapat gejala autokorelasi
2. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari > 0.05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

Berdasarkan output dari SPSS diatas, diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.010 lebih besar dari > 0.05 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi. Dengan demikian, masalah autokorelasi yang tidak dapat diselesaikan dengan Durbin Watson dapat teratasi dengan menggunakan uji Run Tes.

4.3 Pengujian Hipotesis

4.3.1 Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi atau nilai R square digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.14
Hasil Uji koefisien Determinasi

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	.506 ^a	.758	.213	.70221	1.187
a. Predictor: (Constant), LN_BM, LN_PAD, LN_DAK, LN_DAU					
b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)					

Sumber: Hasil SPSS 18

Berdasarkan tabel 4.14 besarnya nilai koefisien determinasi antara variabel Dana Alokasi Umum (X1), Dana Alokasi Khusus (X2), Pendapatan Asli Daerah (X3) dan Belanja Modal (X4) terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y) adalah sebesar 0.758 atau 75.8 %. Hal ini berarti bahwa Pertumbuhan Ekonomi dapat dijelaskan variabel Dana Alokasi Umum (X1), Dana Alokasi Khusus (X2), Pendapatan Asli Daerah (X3) dan Belanja Modal (X4) adalah sebesar 75.8 % selebihnya 24.2 % berasal dari variabel lain yang tidak diteliti dalam model regresi ini.

4.3.2 Uji Statistik F (Simultan)

Tabel 4.15
Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11.169	4	2.792	5.663	.001 ^a
	Residual	32.052	65	.493		
	Total	43.221	69			

a. Predictors: (Constant), LN_BM, LN_PAD, LN_DAK, LN_DAU

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Sumber: Hasil SPSS 18

Uji Simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variable independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0.05. Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel diatas, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05 maka H_1 diterima dan menolak H_0 , sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0.05 maka H_0 diterima dan menolak H_1 .

Berdasarkan tabel Anova diatas menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} adalah sebesar 5.663 dan nilai signifikan $0.001 < \alpha = 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti bahwa antara variabel Dana Alokasi Umum (X1), Dana Alokasi Khusus (X2), Pendapatan Asli Daerah (X3) dan Belanja Modal (X4) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y). Hasil ini diperkuat dengan membandingkan nilai F_{hitung} 5.663 lebih besar dari 2.51.

4.3.3 Uji t (Parsial)

Ujian t dilakukan untuk menguji signifikan variabel bebas terhadap variable terikat secara individual, hal ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t_{tabel} pada *level of significant* 5%. Dimana $t_{tabel} = t(\alpha/2 : n-k-1)$. Nilai $t_{tabel} = t(0,025 : 70-5-1) = 1998$

Tabel 4.16
Hasil Uji t (Parsial)

Model		Coefficients ^a			T	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-15.257	5.120		-2.980	.004
	LN_DAU	.275	.224	.153	1.227	.224
	LN_DAK	.051	.136	.046	.376	.708
	LN_PAD	.296	.116	.315	2.561	.013
	LN_BM	.503	.209	.267	2.409	.019

a. Dependent Variabel : Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Sumber : Hasil SPSS 18

Berdasarkan tabel 4.16 Hasil Uji t diatas menunjukkan bahwa :

1. Nilai t_{hitung} variabel DAU (X1) adalah sebesar $1.227 < \text{nilai } t_{tabel}$ sebesar 1.998 dan nilai signifikan $0.224 > 0.05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel DAU (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).
2. Nilai t_{hitung} variabel DAK (X2) adalah sebesar $0.376 < \text{nilai } t_{tabel}$ sebesar 1.998 dan nilai signifikan $0,708 > 0.05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel DAK (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y)
3. Nilai t_{hitung} variabel PAD (X3) adalah sebesar $2.561 > \text{nilai } t_{tabel}$ sebesar 1.998 dan nilai signifikan $0.013 < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti secara parsial variabel PAD (X3) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).
4. Nilai t_{hitung} variabel BM (X4) adalah sebesar $2.409 > \text{nilai } t_{tabel}$ sebesar 1.998 dan nilai signifikan $0.019 < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti secara parsial variabel BM (X4) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y).

4.4 Hasil Model Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk dapat membuktikan hipotesis yang diajukan sebelumnya, maka dilakukan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui tingkat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara simultan maupun parsial. Data yang diperoleh kemudian di transformasi dalam bentuk *Logaritma Natural* (LN) dengan perangkat lunak *SPSS* dan setelah ditransformasi ke LN. Untuk mengetahui Analisis Regresi Linier Berganda data kemudian diolah menggunakan program statistik yaitu Aplikasi *SPSS 18*. Hasil regresi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.17
Hasil Analisis Regresi

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-15.257	5.120		-2.980	.004
	LN_DAU	.275	.224	.153	1.227	.224
	LN_DAK	.051	.136	.046	.376	.708
	LN_PAD	.296	.116	.315	2.561	.013
	LN BM	.503	.209	.267	2.409	.019

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Sumber: Hasil *SPSS 18*

- a. Konstanta (α) sebesar -15.257, menyatakan bahwa variabel independen dianggap konstan yang berarti jika Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal sama dengan 0 maka Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah akan sebesar -15.257

- b. Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum (X1) sebesar 0.275 tidak signifikan pada $(\alpha) = 0.05$ ini berarti bahwa apabila terjadi kenaikan dalam DAU sebesar 1% dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0.275% dengan anggapan faktor lain bersifat konstan.
- c. Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Khusus (X2) sebesar 0.051 tidak signifikan pada $(\alpha) = 0.05$ ini berarti bahwa apabila terjadi kenaikan DAK sebesar 1% dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0.051% dengan anggapan faktor lain bersifat konstan.
- d. Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X3) sebesar 0.296 signifikan pada $(\alpha) = 0.05$ ini berarti bahwa apabila terjadi kenaikan PAD sebesar 1% dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0.296% dengan anggapan faktor lain bersifat konstan.
- e. Koefisien regresi variabel Belanja Modal (X4) sebesar 0.503 signifikan pada $(\alpha) = 0.05$ ini berarti bahwa apabila terjadi kenaikan Belanja Modal sebesar 1% dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (Y) di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0.503% dengan anggapan faktor lain bersifat konstan.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah

Pada hasil penelitian ini, diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan tingkat kepercayaan 77.6% signifikan 0,224. Nilai koefisien Dana Alokasi Umum sebesar 0,275 yang berarti bahwa apabila Dana Alokasi Umum meningkat 1 persen, maka akan menaikkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,275 Juta. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Variabel Dana Alokasi Umum tidak signifikan disebabkan DAU yang diterima oleh daerah tidak digunakan untuk kegiatan yang bertujuan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah, sehingga peran DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Seharusnya DAU yang diterima daerah dialokasikan untuk belanja pembangunan sebagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi DAU tersebut dialokasikan untuk belanja rutin, sehingga alokasi tersebut tidak tepat sasaran. Pemerintah daerah mengharapkan DAU dari Pusat meningkat setiap tahun, jumlahnya tidak berubah dalam tahun anggaran berjalan, Bagi pemerintah daerah perubahan DAU dalam pertengahan tahun anggaran mengakibatkan ketidakpastian alokasi APBD dan dapat mempengaruhi pencapaian output APBD. Pemerintah Pusat perlu terus mendorong daerah untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan DAU dalam APBD. Kebijakan

mengarahkan sebagian penggunaan DAU untuk infrastruktur dan pemenuhan belanja prioritas. Di samping itu, perlu dilakukan penguatan fungsi monitoring dan pengenaan sanksi kepada daerah yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut.

4.5.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah

Pada Hasil Penelitian ini, Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan tingkat kepercayaan 29.2% signifikan 0,708. Nilai koefisien Dana Alokasi Khusus sebesar 0.051 yang berarti bahwa apabila Dana Alokasi Khusus meningkat 1 persen, maka akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.051 Juta. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Variabel Dana Alokasi Khusus tidak signifikan disebabkan oleh DAK sebagian besar dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang bisa jadi bukan menjadi prioritas pemerintah daerah yang bersangkutan pada tahun berjalan. DAK tidak secara langsung berhubungan dengan faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi seperti jalan dan jembatan. Selain itu, adanya kewajiban penyediaan dana pendamping sebesar 10% dari total nilai alokasi DAK pada APBD tentunya akan menggeser sejumlah anggaran belanja tertentu yang kemungkinan sebenarnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang menunjang pertumbuhan ekonomi.

4.5.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah

Pada hasil penelitian ini, diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan tingkat kepercayaan 99.8% signifikan 0,013. Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,296 yang berarti bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat 1 persen, maka akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,296 Juta. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan tegasnya pemerintah setempat menarik Pendapatan Asli Daerah, maka akan meningkatkan pendapatan di daerah tersebut. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri akan turut membantu daerah untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan yang ada di daerah, yang berarti akan meningkatkan kegiatan ekonomi. Sehingga, berakibat pada peningkatan Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang paling berkontribusi untuk menunjang pembangunan daerah dalam rangka desentralisasi. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulan Fauzi (2013), yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap PDRB. Hal ini disebabkan Pendapatan Asli Daerah digunakan sebagai modal untuk melakukan pembangunan

sehingga akan merangsang kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

4.5.4 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah

Pada hasil penelitian ini, variabel Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan tingkat kepercayaan 99.8% signifikan 0,019. Nilai koefisien Belanja Modal sebesar 0,503 yang berarti bahwa apabila Belanja Modal meningkat 1 persen, maka akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,503 Juta. Hal ini sesuai dengan hipotesis bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hal tersebut membuktikan bahwa belanja modal membawa pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila belanja modal naik, maka produk domestik regional bruto ikut meningkat. Sehingga, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang beralokasi pada belanja modal mampu meningkatkan aktivitas perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Dalam penyediaan pembangunan infrastruktur publik, pemerintah daerah memberikan alokasi belanja modal pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD yang dikeluarkan dari pengeluaran pemerintah telah direncanakan pada pengeluaran sosial dan ekonomi. Belanja modal mempunyai peran strategis pada kualitas layanan publik yang menumbuhkan perekonomian. Dana yang mendorong lancarnya proses sektor swasta dalam pertumbuhan ekonomi yang meningkat antara lain belanja jaringan, jalan, peralatan dan mesin. Selain itu, penyediaan

fasilitas sosial misalnya sekolah, pelayanan kesehatan, perumahan untuk menaikkan investasi modal manusia. Adanya kenaikan belanja modal akan berpengaruh terhadap tingkat produksi di beberapa sektor yang mendorong output ekonomi meningkat.

4.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan sehingga diharapkan dapat diperbaiki pada peneliti selanjutnya yaitu :

1. Variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus belum cukup terbukti sebagai variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah sehingga penelitian mendatang disarankan untuk mengganti variabel tersebut ataupun menambahkan indikator pengukuran yang lebih sesuai sehingga hasil kedua variabel tersebut terbukti mampu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Periode penelitian ini dibatasi hanya dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 sehingga tingkat generalasinya kurang baik. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar periode penelitian ini lebih diperpanjang lagi, yaitu tidak hanya lima tahun sehingga tingkat generalasinya lebih baik
3. Variabel yang diteliti hanya terbatas pada DAU, DAK, PAD dan Belanja Modal, sehingga masih terdapat variabel lain yang kemungkinan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Bagi peneliti mendatang hendaknya melibatkan variabel lainnya, karena pada

dasarnya masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.

4.7 Implikasi

Berdasarkan model yang digunakan dalam penelitian ini maka dapat memperkuat konsep-konsep teoritis dan memberikan dukungan empiris terhadap penelitian terdahulu.

1. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pemerintah Pusat perlu terus mendorong daerah untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan DAU dalam APBD. Kebijakan mengarahkan sebagian penggunaan DAU untuk infrastruktur dan pemenuhan belanja prioritas. Di samping itu, perlu dilakukan penguatan fungsi monitoring dan penerapan sanksi kepada daerah yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Stepvani Uhise (2013) yang menjelaskan bahwa mengingat saat ini kebutuhan fiskal untuk melakukan pelayanan publik pada pemerintah daerah semakin besar, maka sebaiknya pemerintah daerah mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah sebagai bentuk perwujudan kemandirian fiskal
2. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. karena dana alokasi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kurang dioptimalkan untuk berbagi aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan

pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya sehingga tidak mampu meningkatkan produktivitas perekonomian dan pada akhirnya tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian ini menegaskan kembali hasil penelitian sebelumnya oleh Meilita Lukitasari (2016) yang menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan sebijak mungkin untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang akan meningkatkan produktivitas publik hal ini terkait dengan karakteristik atau jenis layanan yang diperlukan oleh masyarakat, misalnya untuk pelayanan emergency, masyarakat tidak mementingkan efisiensi biaya tetapi lebih mengutamakan ketepatan waktu atau tindakan yang diambil untuk menjaga keamanan mereka, contoh lainnya adalah Pembangunan jalan raya dari desa menuju kota, Pembangunan jembatan yang menghubungkan satu desa ke desa yang lain untuk mempermudah akses bagi masyarakat yang ingin melakukan aktivitas

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019, dapat diperoleh kesimpulan :

1. Berdasarkan hasil penelitian dari Regresi Linier Berganda, DAU berpengaruh (secara statistik) tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. DAK berpengaruh (secara statistik) tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
3. PAD berpengaruh (secara statistik) signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Belanja Modal berpengaruh (secara statistik) signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Povinsi Kalimantan Tengah.

5.2 **Saran**

1. Saran untuk variabel-variabel yang tidak signifikan pada penelitian ini yaitu DAU dan DAK :

Beberapa daerah masih memiliki rasio kemandirian fiskal yang tinggi, sedangkan sebagian lainnya masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Perbandingan dana transfer ke daerah masih didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan sebijak mungkin untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang akan meningkatkan produktivitas publik hal ini terkait dengan karakteristik atau jenis layanan yang diperlukan oleh masyarakat, misalnya untuk pelayanan emergency, masyarakat tidak mementingkan efisiensi biaya tetapi lebih mengutamakan ketepatan waktu atau tindakan yang diambil untuk menjaga keamanan mereka, contoh lainnya adalah Pembangunan jalan raya dari desa menuju kota, Pembangunan jembatan yang menghubungkan satu desa ke desa yang lain untuk mempermudah akses bagi masyarakat yang ingin melakukan aktivitas.

2. Penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti (dana bagi hasil dan lainnya).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2003. *Analisis Investasi*. Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat :Jakarta
- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Adi P. H., 2007. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali). *Jurnal Akuntansi Dan Sektor Publik* 08 (01), 1450-1465, Februari 2007
- Ahmad, Yani. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Grafindo
- Anwar, M. L. (2016). Pengaruh DAU, DAK, PAD terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan (Kota Manado tahun 2001-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2).
- Ardhani, P. & Ardiyanto, M. D. (2011). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro)
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Boina Aksara
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi 10 Makasar.
- Deviani, D. (2016). Analisis Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan (Studi Empiris Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat). *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), 1-8
- Djojohadikusumo, Sumitro, 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jakarta : LP3ES
- Elsera, G. D. (2017). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan* (Doctoral dissertation, STIE Indonesia Banjarmasin).
- Fauznyi, W. (2013). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD). dana Alokasi Khusus (DAK), dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan Pajak terhadap

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah tahun 2003-2011.

Iman Ghozali, 2011 ; *Ekonometrika, Teori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*, Badan Penerbit Program Doktor Universitas Diponegoro, Semarang

Jhingan, M. L.. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Terj. D. Guritno (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

Jhingan, M.L. (2014). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Edisi Keenambelas. Jakarta: Rajawali

Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002. Pedoman pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Komariah, D., Yogiantoro, M., & Hukom, A. (2019). PENGARUH BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(S1), 523-532.

Kuncoro, M. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah*. Erlangga

Mangkoesebroto, 2001. *Ekonomi public*, BPFE-Yogyakarta. Hal 1, 170, 171, 173

Mankiw, N. G. (2006). *Makroekonomi Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat

Mikesell, J. L. (2003). International experiences with administration of local taxes: A review of practices and issues. Tax Policy and Administration Thematic Group, The World Bank, 1-44.

Ndadari, Adi. 2008. Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Pemerintah Pusat. 2nd konferensi UKWMS, Surabaya 6 September 2008

Novalistia, R. L. (2016). PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH DAN BAGI HASIL PAJAK TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN ATAU KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provins. *Journal Of Accounting*, 2(2).

Permendagri No. 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Rahayu, T. (2016). *ANALISIS BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2010-2014* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

- Saggaf. (1999). *Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Peningkatan Pertumbuhan ekonomi di Kotamadya, Pekan Baru*
- Siang, I. S. (1992). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan serta sumbangannya terhadap pendapatan asli daerah Propinsi Kalimantan Tengah: laporan hasil penelitian: penelitian kelompok*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Palangka Raya, Balai Penelitian, Fakultas Ekonomi.
- Sirojuzilam; dan Kasyful Mahalli. 2010. *Regional: pembangunan, perencanaan dan ekonomi*. Medan: USU Press
- Shah, A. (1994). *The reform of intergovernmental fiscal relations in developing and emerging market economies*. The World Bank.
- Sugiyono. (2007). *Statistika Untuk Penelitian* (12th ed.). Bandung: Alfabeta
- Suparmoko, 2000. *Keuangan Negara: Teori dan Praktek*. BPFE-Yogyakarta. Hal 4,44-45
- Thoha, Miftah. 2006. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Todaro, Michael. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Kerja* (Jakarta: Erlangga, 2000)
- Uhise, S. (2013). Dana Alokasi Umum (DAU) pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara dengan belanja modal sebagai variabel intervening. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).
- Undang- Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2007.
- Wibisana, A. B. (2014). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Tahun 2001-2010*.

Lampiran I

Sektor PDRB Seri 2010	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	17 031,9	17 686,4	18 514,0	19 812,5	21 186,1
B. Pertambangan dan Penggalian	12 654,6	13 616,3	14 796,6	14 784,2	15 663,3
C. Industri Pengolahan	11 976,4	12 868,9	14 020,8	14 736,7	15 365,0
D. Pengadaan Listrik dan Gas	61,9	68,3	72,3	78,8	86,3
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	65,6	68,5	68,6	74,3	78,7
F. Konstruksi	6 918,5	7 459,5	7 863,0	7 982,6	8 537,9
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8 712,5	9 347,8	10 108,4	11 241,1	11 941,5
H. Transportasi dan Pergudangan	4 735,1	5 169,3	5 590,4	6 064,2	6 549,3
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 321,5	1 425,3	1 504,0	1 608,2	1 705,5
J. Informasi dan Komunikasi	937,6	996,0	1 060,4	1 147,9	1 206,9
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2 491,9	2 673,2	2 910,2	2 972,3	3 153,0
L. Real Estate	1 572,1	1 656,3	1 726,6	1 874,9	1 956,9
M, N. Jasa Perusahaan	29,0	30,8	32,4	35,0	37,4

O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4 827.3	4 940.0	5 140.2	5 524.1	5 892.0
P. Jasa Pendidikan	3 436.2	3 649.5	3 778.5	4 105.1	4 363.1
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1 362.3	1 435.8	1 516.8	1 646.8	1 732.9
R, S, T, U. Jasa Lainnya	756.7	808.5	841.7	912.2	972.9
PDRB	78 891.0	83 900.2	89 544.9	94 600.9	100 428.7
PDRB Tanpa Migas	78 242.4	83 249.8	88 829.6	93 849.4	99 634.1

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah 2020

Lampiran II**Jumlah PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019**

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kotawaringin Barat	10 112 713,5	10 704 711,7	11 432 688,7	12 171 160,2	12 875 812,3
Kotawaringin Timur	13 835 677,8	14 932 757,0	16 118 192,4	17 234 856,6	18 468 087,1
Kapuas	8 241 408,5	8 842 069,6	9 515 602,2	10 182 288,5	10 910 917,6
Barito Selatan	3 554 129,6	3 754 054,9	3 958 245,8	4 160 875,1	4 365 953,7
Barito Utara	5 696 609,8	6 008 577,3	6 369 617,4	6 748 596,7	7 114 495,9
Sukamara	2 243 525,9	2 381 089,9	2 530 336,2	2 686 337,8	2 848 949,2
Lamandau	2 882 203,3	3 074 911,4	3 280 863,8	3 505 911,0	3 747 248,1
Seruyan	4 943 248,3	5 196 334,8	5 465 511,1	5 750 252,3	6 048 859,7
Katingan	3 990 904,8	4 251 997,9	4 531 079,0	4 829 628,2	5 110 045,9
Pulang Pisau	2 682 506,7	2 845 265,5	3 011 275,2	3 190 169,7	3 393 327,9
Gunung Mas	2 678 816,1	2 866 190,0	3 056 181,1	3 266 129,5	3 504 388,4
Barito Timur	4 275 067,0	4 509 974,3	4 779 685,7	5 052 798,0	5 327 941,2
Murung Raya	4 684 225,0	4 953 891,0	5 244 659,4	5 538 869,4	5 867 650,2

Palangka Raya	8 286 033,4	8 859 548,2	9 479 165,6	10 154 119,2	10 881 804,9
Kalimantan Tengah	78 891.0	83 900.2	89 544.9	94 600.9	100 428.7

Lampiran III

Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kotawaringin Barat	7,32	5,85	6,80	6,46	5,79
Kotawaringin Timur	7,66	7,93	7,94	6,93	7,16
Kapuas	7,27	7,29	7,62	7,01	7,16
Barito Selatan	5,54	5,63	5,44	5,12	4,93
Barito Utara	5,29	5,48	6,01	5,95	5,42
Sukamara	6,01	6,12	6,27	6,17	6,05
Lamandau	6,76	6,69	6,70	6,86	6,88
Seruyan	5,17	5,12	5,18	5,21	5,19
Katingan	6,53	6,54	6,56	6,59	5,81
Pulang Pisau	7,71	6,06	5,83	5,94	6,37
Gunung Mas	6,96	7,00	6,63	6,87	7,29
Barito Timur	5,16	5,50	5,98	5,71	5,45
Murung Raya	6,88	5,76	5,87	5,61	5,94

Palangka Raya	7,19	6,92	6,99	7,12	7,17
---------------	------	------	------	------	------

Lampiran IV

Tabel Tabulasi Variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019

Tahun	Kabupaten/Kota	DAU	DAK	PAD	BM	Pert. Ekonomi
2015	Kotawaringin Barat	614.824.773	34.415.480	123.315.124	295.819.043	7,32
	Kotawaringin Timur	788.804.313	52.625.790	159.190.201	289.548.185	7,66
	Kapuas	820.035.397	177.087.570	89.107.923	412.802.501	7,27
	Barito Selatan	570.135.858	58.034.736	38.343.110	178.068.643	5,54
	Barito Utara	468.744.476	54.678.128	50.310.290	355.601.368	5,29
	Sukamara	407.283.888	143.791.096	2.733.929	292.669.459	6,01
	Lamandau	433.768.085	170.821.780	42.093.087	339.984.344	6,76
	Seruyan	563.570.718	31.227.610	37.931.102	324.779.438	5,17
	Katingan	668.100.108	70.021.140	40.799.553	338.099.808	6,53
	Pulang Pisau	522.284.767	153.445.650	36.487.816	347.115.725	7,71
	Gunung Mas	533.355.913	65.069.980	32.587.769	235.485.527	6,96
	Barito Timur	468.744.476	54.678.128	37.869.997	163.443.434	5,16

	Murung Raya	593.989.575	18.435.720	54.881.449	351.364.795	6,88
	Palangka Raya	599.588.799	61.088.040	122.314.717	205.664.601	7,19
2016	Kotawaringin Barat	662.249.343	261.497.676	143.330.742	382.638.346	5,85
	Kotawaringin Timur	832.526.925	215.549.330	189.388.000	293.635.470	7,93
	Kapuas	881.812.337	338.538.892	85.832.949	520.040.870	7,29
	Barito Selatan	583.667.676	154.475.743	44.019.870	163.482.408	5,63
	Barito Utara	569.672.938	181.174.426	56.816.976	310.538.459	5,48
	Sukamara	428.055.095	193.136.012	38.622.541	343.432.729	6,12
	Lamandau	466.229.206	230.533.573	45.563.688	333.129.581	6,69
	Seruyan	621.428.614	97.412.019	56.880.204	357.730.478	5,12
	Katingan	708.751.031	119.416.234	46.280.722	309.439.959	6,54
	Pulang Pisau	576.640.254	229.860.606	38.078.420	348.580.737	6,06
	Gunung Mas	564.028.300	172.682.185	37.472.945	292.842.212	7,00
	Barito Timur	482.815.506	142.816.983	34.431.777	158.394.992	5,50
	Murung Raya	678.555.108	160.694.081	33.853.527	388.512.882	5,76
	Palangka Raya	657.826.439	82.298.801	119.961.089	285.686.219	6,92
2017	Kotawaringin Barat	652.906.913	229.039.333	176.855.125	403.321.116	6,80
	Kotawaringin Timur	820.559.562	197.859.683	245.980.100	256.085.596	7,94
	Kapuas	866.321.730	274.622.436	93.717.860	467.103.978	7,62
	Barito Selatan	576.041.341	149.454.266	49.297.480	133.616.784	5,44

	Barito Utara	559.665.616	155.995.784	64.810.020	379.813.000	6,01
	Sukamara	420.535.543	114.420.630	49.848.716	253.157.399	6,27
	Lamandau	462.248.605	95.745.021	162.481.918	233.533.779	6,70
	Seruyan	616.493.956	137.376.858	110.713.320	321.261.094	5,18
	Katingan	696.300.554	158.259.012	52.990.318	362.955.760	6,56
	Pulang Pisau	568.390.382	147.518.545	36.201.584	310.186.757	5,83
	Gunung Mas	559.898.689	239.410.089	36.509.690	313.867.664	6,63
	Barito Timur	477.145.707	78.959.555	100.370.174	127.558.206	5,98
	Murung Raya	667.654.598	154.111.161	68.670.822	219.839.334	5,87
	Palangka Raya	646.270.544	107.835.409	150.925.083	240.885.258	6,99
2018	Kotawaringin Barat	652.906.913	169.591.409	179.785.921	340.758.782	6,46
	Kotawaringin Timur	820.491.554	198.592.943	200.129.417	344.206.470	6,93
	Kapuas	866.110.470	271.460.074	107.659.736	425.567.547	7,01
	Barito Selatan	576.041.341	160.970.190	81.427.861	204.359.110	5,12
	Barito Utara	559.665.616	162.501.937	71.442.644	285.258.849	5,95
	Sukamara	420.535.543	122.277.982	44.572.552	219.950.090	6,17
	Lamandau	462.248.605	95.832.653	89.396.746	140.931.023	6,86
	Seruyan	616.416.406	186.575.296	93.253.508	314.813.389	5,21
	Katingan	695.606.221	208.590.150	53.291.968	336.758.778	6,59
	Pulang Pisau	568.390.382	207.858.468	42.610.562	254.659.839	5,94

	Gunung Mas	559.898.689	180.998.704	42.147.371	252.351.552	6,87
	Barito Timur	478.975.191	118.595.704	47.823.933	92.281.184	5,71
	Murung Raya	667.654.598	188.877.237	59.797.986	230.400.464	5,61
	Palangka Raya	646.270.544	149.663.979	154.638.490	232.289.846	7,12
2019	Kotawaringin Barat	684.692.066	194.060.000	170.190.000	517.160.272	5,79
	Kotawaringin Timur	843.967.281	283.952.915	220.434.587	481.353.638	7,16
	Kapuas	829.581.953	325.430.502	157.847.438	445.748.774	7,16
	Barito Selatan	590.286.240	62.078.400	77.340.060	225.100.000	4,93
	Barito Utara	573.285.753	95.097.219	48.936.339	294.930.118	5,42
	Sukamara	432.962.550	712.291,34	373.855,58	180.600.000	6,05
	Lamandau	472.674.527	919.283.039	707.485.300	132.390.929	6,88
	Seruyan	629.417.652	120.786.747	124.000.000	368.846.840	5,19
	Katingan	712.958.173	172.817.723	66.034.442	188.117.782	5,81
	Pulang Pisau	581.330.000	142.890.000	81.370.000	210.330.000	6,37
	Gunung Mas	575.943.522	147.350.057	77.264.458	168.520.660	7,29
	Barito Timur	491.080.267	64.365.386	58.020.000	117.050.000	5,45
	Murung Raya	684.505.504	132.383.933	801.288.751	139.916.163	5,94
	Palangka Raya	673.278.638	143.151.465	144.641.759	219.922.828	7,17

Lampiran V

Hasil Model Semi Logaritma Natural Variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2019

DAU	DAK	PAD	BM	LN_DAU	LN_DAK	LN_PAD	LN_BM
614824773	34415480	123315124	295819043	20.24	17.35	18.63	19.51
662249343	261497676	143330742	382638346	20.31	19.38	18.78	19.76
652906913	229039333	176855125	403321116	20.30	19.25	18.99	19.82
652906913	169591409	179785921	340758782	20.30	18.95	19.01	19.65
684692066	194060000	170190000	51760272	20.34	19.08	18.95	17.76
788804313	52625790	159190201	289548185	20.49	17.78	18.89	19.48
832526925	215549330	189388000	293635470	20.54	19.19	19.06	19.50
820559562	197859683	245980100	256085596	20.53	19.10	19.32	19.36
820491554	198592943	214548462	344206470	20.53	19.11	19.18	19.66
843967281	283952915	220434587	481353638	20.55	19.46	19.21	19.99
820035397	177087570	89107923	412802501	20.52	18.99	18.31	19.84
881812337	338538892	85832949	520040870	20.60	19.64	18.27	20.07
866321730	274622436	93717860	467103978	20.58	19.43	18.36	19.96
866110470	271460074	107659736	425567547	20.58	19.42	18.49	19.87
829581953	325430502	157847438	445748774	20.54	19.60	18.88	19.92
570135858	58034736	38343110	178068643	20.16	17.88	17.46	19.00
583667676	154475743	44019870	163482408	20.18	18.86	17.60	18.91

DAU	DAK	PAD	BM	LN_DAU	LN_DAK	LN_PAD	LN_BM
576041341	149454266	49297480	133616784	20.17	18.82	17.71	18.71
576041341	160970190	81427861	204359110	20.17	18.90	18.22	19.14
59028624	6207840	7734006	225100000	17.89	15.64	15.86	19.23
468744476	54678128	50310290	355601368	19.97	17.82	17.73	19.69
569672938	181174426	56816976	310538459	20.16	19.01	17.86	19.55
559665616	155995784	64810020	379813000	20.14	18.87	17.99	19.76
55665616	162501937	71442644	285258849	17.83	18.91	18.08	19.47
573285753	95097219	48936339	294930118	20.17	18.37	17.71	19.50
407283888	143791096	2733929	292669459	19.83	18.78	14.82	19.49
428055095	193136012	38622541	343432729	19.87	19.08	17.47	19.65
420535543	114420630	49848716	253157399	19.86	18.56	17.72	19.35
420535543	122277982	44572552	219950090	19.86	18.62	17.61	19.21
432962550	71229134	37385558	180600000	19.89	18.08	17.44	19.01
433768085	170821780	42093087	339984344	19.89	18.96	17.56	19.64
466229206	230533573	45563688	333129581	19.96	19.26	17.63	19.62
462248605	95745021	162481918	233533779	19.95	18.38	18.91	19.27
462248605	95832653	89396746	140931023	19.95	18.38	18.31	18.76
472674527	919283039	707485300	132390929	19.97	20.64	20.38	18.70
563570718	31227610	37931102	324779438	20.15	17.26	17.45	19.60
621428614	97412019	56880204	357730478	20.25	18.39	17.86	19.70
616493956	137376858	110713320	321261094	20.24	18.74	18.52	19.59
616416406	186575296	93253508	314813389	20.24	19.04	18.35	19.57
629417652	120786747	124000000	368846840	20.26	18.61	18.64	19.73
668100108	70021140	40799553	338099808	20.32	18.06	17.52	19.64
708751031	119416234	46280722	309439959	20.38	18.60	17.65	19.55
696300554	158259012	52990318	362955760	20.36	18.88	17.79	19.71

DAU	DAK	PAD	BM	LN_DAU	LN_DAK	LN_PAD	LN_BM
695606221	208590150	53291968	336758778	20.36	19.16	17.79	19.63
712958173	172817723	66034442	188117782	20.38	18.97	18.01	19.05
522284767	153445650	36487816	347115725	20.07	18.85	17.41	19.67
576640254	229860606	38078420	348580737	20.17	19.25	17.46	19.67
568390382	147518545	36201584	310186757	20.16	18.81	17.40	19.55
568390382	207858468	42610562	254659839	20.16	19.15	17.57	19.36
581330000	142890000	81370000	210330000	20.18	18.78	18.21	19.16
533355913	65069980	32587769	235485527	20.09	17.99	17.30	19.28
564028300	172682185	37472945	292842212	20.15	18.97	17.44	19.50
559898689	239410089	36509690	313867664	20.14	19.29	17.41	19.56
559898689	180998704	42147371	252351552	20.14	19.01	17.56	19.35
575943522	147350057	77264458	168520660	20.17	18.81	18.16	18.94
468744476	54678128	37869997	163443434	19.97	17.82	17.45	18.91
482815506	142816983	34431777	158394992	20.00	18.78	17.35	18.88
477145707	78959555	100370174	127558206	19.98	18.18	18.42	18.66
478975191	118595704	47823933	92281184	19.99	18.59	17.68	18.34
491080267	64365386	58020000	117050000	20.01	17.98	17.88	18.58
593989575	18435720	54881449	351364795	20.20	16.73	17.82	19.68
678555108	160694081	33853527	388512882	20.34	18.90	17.34	19.78
667654598	154111161	68670822	219839334	20.32	18.85	18.04	19.21
667654598	188877237	59797986	230400464	20.32	19.06	17.91	19.26
684505504	132383933	801288751	139916163	20.34	18.70	20.50	18.76
599588799	61088040	122314717	205664601	20.21	17.93	18.62	19.14
657826439	82298801	119961089	285686219	20.30	18.23	18.60	19.47
646270544	107835409	150925083	240885258	20.29	18.50	18.83	19.30
646270544	149663979	154638490	232289846	20.29	18.82	18.86	19.26

DAU	DAK	PAD	BM	LN_DAU	LN_DAK	LN_PAD	LN_BM
673278638	143151465	144641759	219922828	20.33	18.78	18.79	19.21

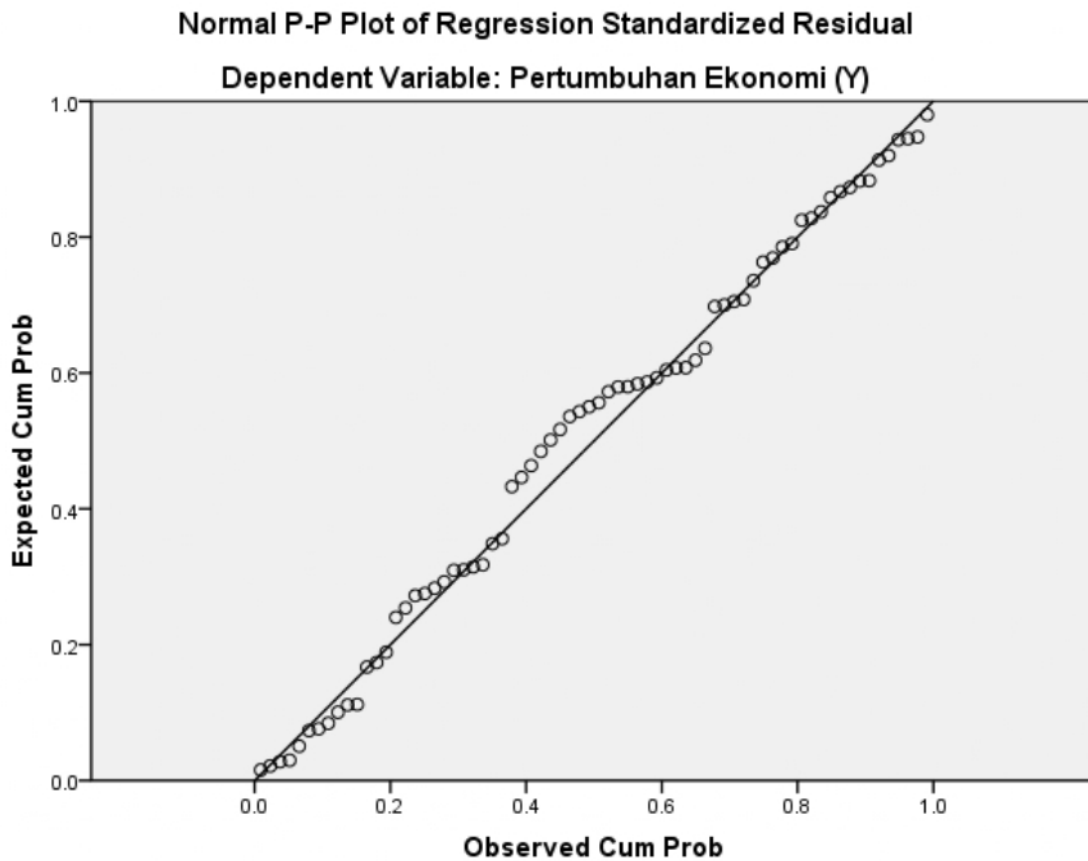
LAMPIRAN VI

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-15.257	5.120		-2.980	.004
	LN_DAU	.275	.224	.153	1.227	.224
	LN_DAK	.051	.136	.046	.376	.708
	LN_PAD	.296	.116	.315	2.561	.013
	LN_BM	.503	.209	.267	2.409	.019

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Hasil Uji Normalitas Data



Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations

			LN_DAU	LN_DAK	LN_PAD	LN_BM	Unstandardized Residual
Spearman's rho	LN_DAU	Correlation Coefficient	1.000	.383**	.550**	.386**	.021
		Sig. (2-tailed)	.	.001	.000	.001	.861
		N	70	70	70	70	70
	LN_DAK	Correlation Coefficient	.383**	1.000	.256*	.389**	.016
		Sig. (2-tailed)	.001	.	.032	.001	.894
		N	70	70	70	70	70
	LN_PAD	Correlation Coefficient	.550**	.256*	1.000	.047	.069
		Sig. (2-tailed)	.000	.032	.	.697	.571
		N	70	70	70	70	70
	LN_BM	Correlation Coefficient	.386**	.389**	.047	1.000	-.028
		Sig. (2-tailed)	.001	.001	.697	.	.818
		N	70	70	70	70	70
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.021	.016	.069	-.028	1.000	
	Sig. (2-tailed)	.861	.894	.571	.818	.	
	N	70	70	70	70	70	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : Hasil SPSS 18

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-15.257	5.120		-2.980	.004		
	LN_DAU	.275	.224	.153	1.227	.224	.732	1.365
	LN_DAK	.051	.136	.046	.376	.708	.767	1.303
	LN_PAD	.296	.116	.315	2.561	.013	.752	1.329
	LN_BM	.503	.209	.267	2.409	.019	.926	1.080

a. Dependent Variable : Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Hasil Spss 18

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.508 ^a	.758	.213	.70221	1.187

a. Predictors: (Constant), LN_BM, LN_PAD, LN_DAK, LN_DAU

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Hasil SPSS 18

Hasil Uji Run Tes

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.09382
Cases < Test Value	35
Cases >= Test Value	35
Total Cases	70
Number of Runs	25
Z	-2.649
Asymp. Sig. (2-tailed)	.010

a. Median

Sumber : Hasil SPSS 18

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	.506 ^a	.758	.213	.70221	1.187

a. Predictor: (Constant), LN_BM, LN_PAD, LN_DAK, LN_DAU

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Sumber : Hasil SPSS 18

Hasil Uji Statistik F (Simultan)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11.169	4	2.792	5.663	.001 ^a
	Residual	32.052	65	.493		
	Total	43.221	69			

a. Predictors: (Constant), LN_BM, LN_PAD, LN_DAK, LN_DAU

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Sumber : Hasil SPSS 18

Hasil Uji Statistik t (Parsial)

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-15.257	5.120		-2.980	.004
	LN_DAU	.275	.224	.153	1.227	.224
	LN_DAK	.051	.136	.046	.376	.708
	LN_PAD	.296	.116	.315	2.561	.013
	LN_BM	.503	.209	.267	2.409	.019

a. Dependent Variabel : Pertumbuhan Ekonomi (Y)

Sumber : Hasil SPSS 18